



Balai KIPM  
\_\_\_\_\_  
Jakarta II

**Laporan Kinerja  
T.A 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan pada Balai KIPM Jakarta II selama Triwulan IV Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV Tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan support dan sarannya sehingga pelaksanaan kegiatan Triwulan IV Tahun 2025 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 12 Januari 2026

Plt. Kepala Balai KIPM Jakarta II



Dedi Supardi, S.St.Pi

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	IV
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis.....	4
1.4 Sistematika Penyajian.....	5
<b>II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
1.1 Sasaran .....	7
1.2 Indikator dan Target Kinerja .....	8
1.3 Pengukuran Kinerja .....	10
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja .....	11
3.2 Analisis dan Evaluasi.....	14
3.3 Realisasi Anggaran .....	33
<b>IV. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Rekomendasi.....	34
4.3 Tindak lanjut Rekomendasi .....	34

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Jakarta IITA 2025	
Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Balai KIPM Jakarta II TW IV Tahun 2025	
Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 TW IV Tahun 2025	15
Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 TW IV Tahun 2025	16
Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 TW IV Tahun 2025	17
Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 TW IV Tahun 2025	18
Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 TW IV Tahun 2025	19
Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 TW IV Tahun 2025	20
Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 TW IV Tahun 2025	21
Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 TW IV Tahun 2025	21
Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 TW IV Tahun 2025	23
Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 TW IV Tahun 2025	28
Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 TW IV Tahun 2025	29
Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 TW IV Tahun 2025	29
Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 TW IV Tahun 2025	30
Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 TW IV Tahun 2025	30
Tabel 17 Target dan Realisasi IK15 TW IV Tahun 2025	30
Tabel 20 Penyerapan Anggaran Per Kegiatan TW IV Tahun 2025	38
Tabel 21 Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja TW IV Tahun 2025	39

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah 111,63% Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Jakarta II yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Dari 15 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK tahun 2025 Balai KIPM Jakarta II mempunyai Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Target Kinerja Balai KIPM Jakarta II terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan.

Balai KIPM Jakarta II telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung Pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama periode Triwulan IV Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut : ***Sasaran strategis 1 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan.***

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II, target triwulan IV adalah 70% dan realisasi 100% sehingga capaian 120%;
- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II, target triwulan IV adalah 70% dan realisasi 97,50%, dengan capaiannya 120%;
- Lokal pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II, target triwulan IV 1% sudah tercapai 1% sehingga capaiannya 100%
- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II, target triwulan IV 99% sudah tercapai 100% sehingga capaiannya 101,01 %.

**Sasaran strategis 2 yaitu terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan yang sesuai standar.**

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Balai KIPM Jakarta II, dari target 75%, realisasi 84,32% sehingga capaiannya 112,43%;
- Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 75%, realisasi 89,75% sehingga capaiannya 119,67%.

**Sasaran Strategis 3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.**

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 92%, realisasi 90,08%, sehingga capaian nilai kinerja sebesar 97,91%;
- Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II dari target 71,50%, realisasi 100%, sehingga capaian nilai kinerja sebesar 120%;
- Presentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 100%, realisasi 100%, sehingga capaian nilai kinerja sebesar 100%;
- Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 82%, realisasi 83,22%, sehingga capaian nilai kinerja sebesar 101,49%;
- Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 86%, realisasi 86,25%, sehingga capaian nilai kinerja sebesar 100,29%;
- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II dari target 85%, realisasi 100% sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 117,65%;
- Persentase Rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II dari target 76%, realisasi 100% sehingga capaian nilai kinerja sebesar 120%;
- Presentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II, dari target 70%, realisasi 75,14%, sehingga capaian nilai kinerja sebesar 107,34%;
- Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II dari target 3,36%, realisasi 96,15% sehingga capaian nilai kinerja sebesar 120%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Balai KIPM Jakarta II Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Triwulan IV Tahun2025 dengan sasaran stategis sebanyak 3 sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk

dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Balai KIPM Jakarta II dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Balai KIPM Jakarta II pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Balai KIPM Jakarta II dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta system jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM Jakarta II) merupakan kepanjangan tangan dari BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Jakarta II dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Jakarta II dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama triwulan IV tahun 2025. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Jakarta II. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keamanan Hasil Perikanan, sebagai penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai KIPM Jakarta II menyelenggarakan fungsi:

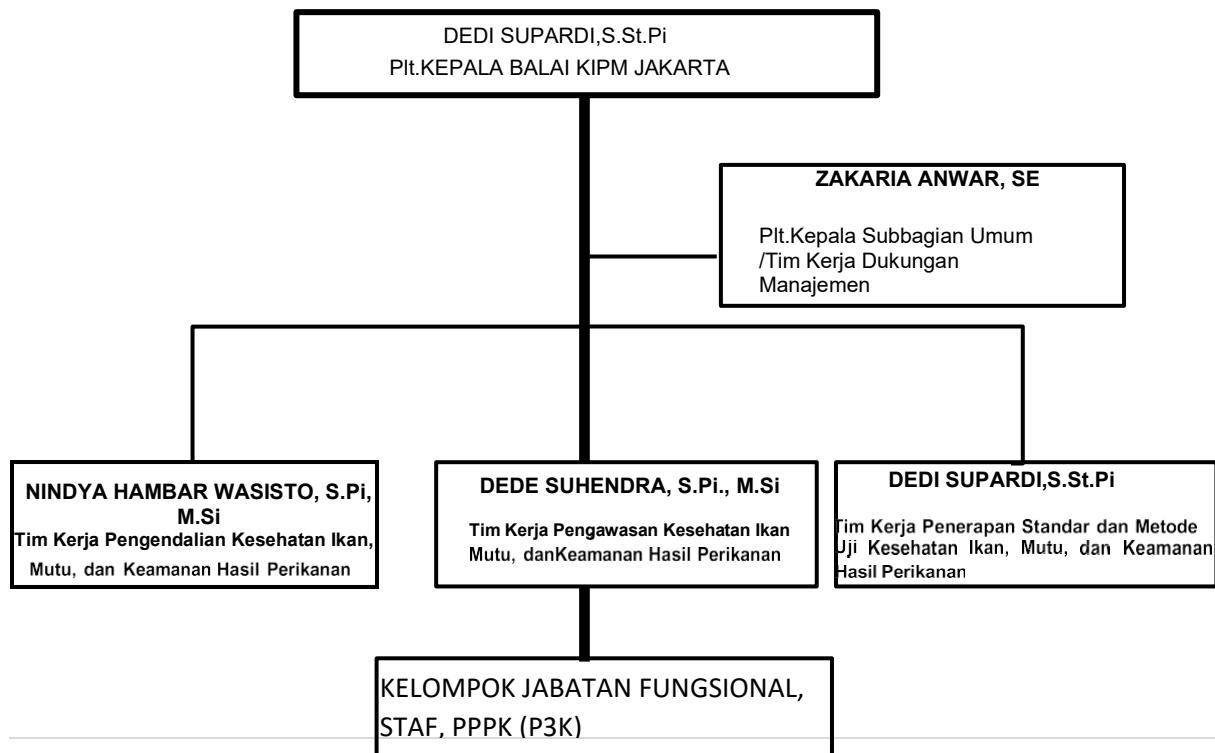
- A. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan; merupakan mempunyai tugas sebagai Quaity Assurance;
- B. mengatur pelaksanaan system penjaminan mutu ditingkat lokal diseluruh negara.
- C. Memaparkan pada tingkat hulu, Lembaganya melaksanakan sertifikasi seperti Cara penanganan yang baik (good handling practices), Cara budidaya ikan yang baik (good aquaculture practices), Cara produksi obat ikan yang baik (good fish drugs production practices), Cara produksi pakan ikan yang baik(good fish feed production practices), Cara penanganan yang baik di atas kapal penangkap ikan (good handling practices on board fishing ports) ;
- D. Sementara pada tingkat hilir, BPPMHKP melaksanakan sertifikat cara pembuatan yang baik (good manufacturing practices), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan pengelolaan distribusi ikan yang baik (good fish distribution management practices).

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai KIPM Jakarta II, Plt.Kepala Balai KIPM Jakarta II dibantu oleh Plt.Kepala Subbagian Umum, 2 orang Inspektur Mutu Ahli Madya, 6 Inspektur Mutu Ahli Muda (2 orang ketua Pokja)

1 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 3 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, 1 orang Analis Mutu Hasil Perikanan, 2 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, 3 orang staf pelaksana, dan 14 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 11 orang PJLP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai KIPM Jakarta II, Plt.Kepala Balai KIPM Jakarta II dibantu oleh Plt.Kepala Subbagian Umum, 3 orang Inspektur Mutu Ahli Madya, 6 Inspektur Mutu Ahli Muda ( 2 orang ketua Pokja), 1 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 4 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, 2 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, 2 orang CPNS, 3 orang staf pelaksana, dan 14 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPPK) dan 11 orang PJLP.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Jakarta II**



## 1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Balai KIPM Jakarta II disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Balai KIPM Jakarta II adalah sebagai berikut:

Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan joint inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM analis data.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

## 1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 SASARAN**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Balai KIPM Jakarta II tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.

#### **PETA STRATEGIS BALAI KIPM JAKARTA II TAHUN 2025**

Terselenggaranya  
Pengendalian dan Pengawasan  
Mutu Hasil Perikanan

**Terselenggaranya Pengendalian Sistem  
jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan  
dan perikanan yang konsisten sesuai standar**

**Tatakelola pemerintahan yang  
efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang  
pengendalian dan pengawasan mutu hasil  
kelautan dan perikanan**

**Gambar 2 Peta Strategi BALAI KIPM JAKARTA II tahun 2025**

## 2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pada Tahun 2025 Balai KIPM Jakarta II mempunyai indikator sebanyak 15 Indikator sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Balai KIPM Jakarta II Tahun 2025**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
		2025	TW IV		
<b>Kegiatan 1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>					
SK1.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70	70	
	2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	70	70	
	3	Lokal pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Lingkup Balai KIPM Jakarta II (lokasi)	1	1	
	4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II (persen)	99	99	
<b>Kegiatan 2. Manajemen Mutu</b>					
SK2.1 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan perikanan yang sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Lingkup di Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	75	75	

	6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen lembaga inspeksi Lingkup diBalai KIPM Jakarta II <b>(Nilai)</b>	75	75	
SK3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(Nilai)</b>	92	92
	8	Nilai Kinerja Perencanaan anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(Nilai)</b>	71,50	71,50	
	9	Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	100	100	
	10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(Indeks)</b>	82	82	
	11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(Nilai)</b>	86	86	
	12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	85	85	
	13	Persentase rencana umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	76	76	
	14	Persentase pemenuhan Dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70	70	
	15	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Jakarta II <b>(Nilai)</b>	3,36	3,36	

## 1.4 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah: Angka maksimum adalah 120;

Angka minimum adalah 0;

Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Indeks Capaian IKU = Realisasi/Target x 100%

Polarisasi Minimize

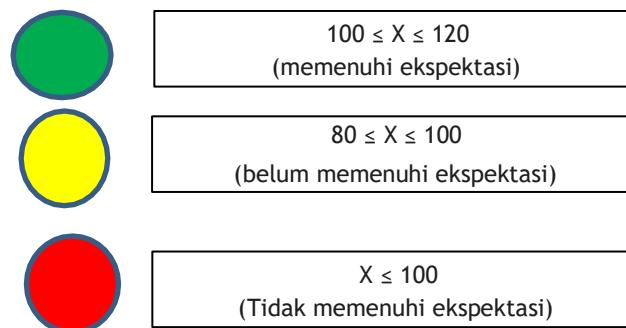
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Indeks Capaian IKU =  $\{(1 + (1-\text{Realisasi}/\text{Target})\} \times 100\%$

Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

1. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

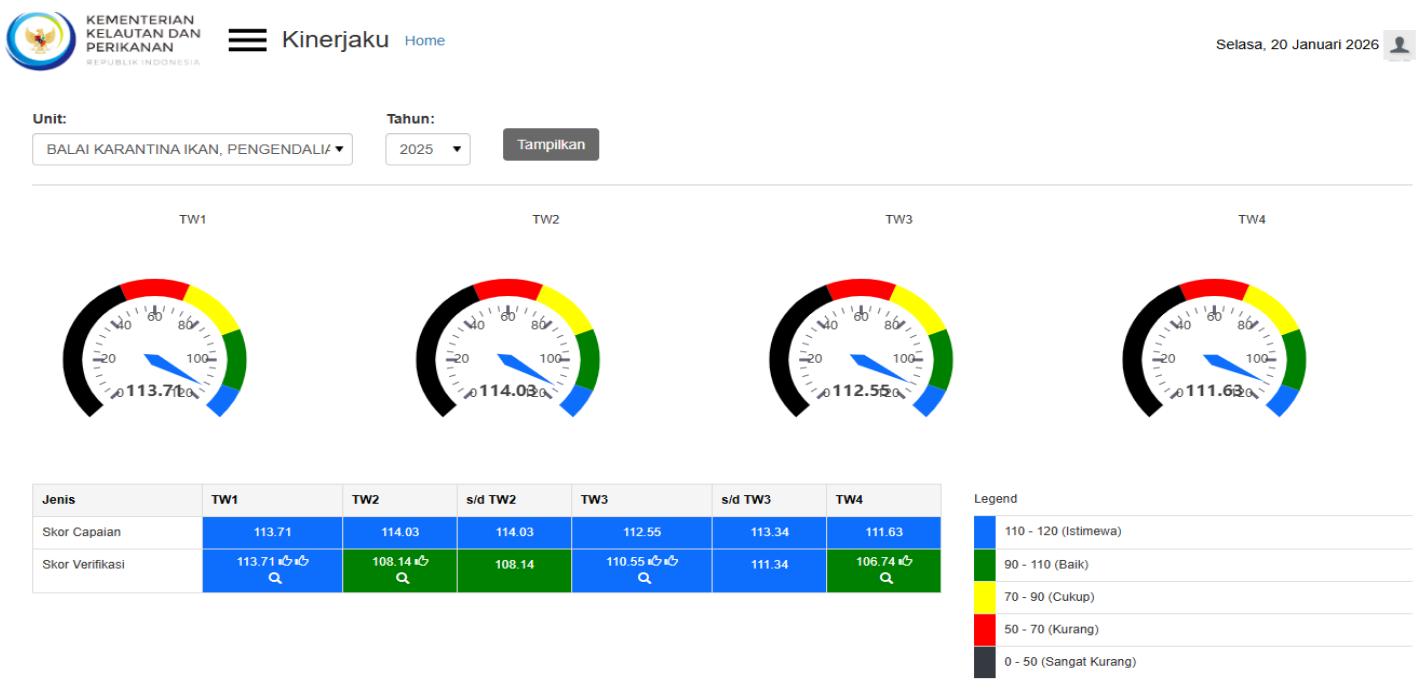


## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 111,63% berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).



Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan IV Tahun 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2

**Tabel 2 Capaian kinerja Triwulan IV tahun 2025**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN IV 2025		
		TARGET	REALISASI	%
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>				
SK1.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan Perikanan	1	Percentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70	100
	2	Percentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	70	97,50
	3	Lokal pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (lokasi)	1	1
	4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II (persen)	99	100
				101,01

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN IV 2025		
			TARGET	REALISASI	%
<b>Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan</b>					
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	75	84,32
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	75	89,75
<b>Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP</b>					
SK3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	92	90,08
		8	Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	71,50	100
		9	Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	100	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II (Indeks)	82	83,22
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	86	86,25
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	85	100
		13	Persentase rencana umum Pengadaan PBJ yang diumumkan yang pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	76	100
		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70	75,14
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	3,36	96,15
					120

## **3.2 ANALISIS DAN EVALUASI**

### **Kegiatan Pengendalian Mutu**

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar.

#### **Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan**

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Jakarta II. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan lingkup Balai KIPM Jakarta II.

##### **IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II**

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten;

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya;

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: Standar Nasional Indonesia (SNI) Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada tahun 2025 indikator ini merupakan IKU baru di Balai KIPM Jakarta II, pada Triwulan IV Tahun 2025, indikator ini mempunyai target 70% dan realisasi adalah 100% dengan persentase capaian sebesar 120%

**Tabel 3 Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan IV Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024- 2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	83,33	100	70%	100	120%	70%	100%

#### **IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)**

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
  1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
  2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
  3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada tahun 2025 indikator ini merupakan IKU baru di BKIPM Jakarta II, dan pada Triwulan IV Tahun 2025 ditargetkan 70%, realisasi adalah 93% dengan capaian persentase sebesar 120%

**Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan IV Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II	72,04%	97,50%	70%	97,50%	120%	70%	93%

### **IK3. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II**

Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar modern, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic; Bentuk pengawasannya adalah penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan.

Pada tahun 2025 indikator ini merupakan IKU baru di BKIPM Jakarta II, dan Pada Triwulan IV tahun 2025 ditargetkan 1 lokasi, realisasi adalah 1 lokasi dengan capaian persentase sebesar 100%.

**Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan IV Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup	-	100%	1	1	100%	-	-%

**IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II**

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor); Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional; Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan. pada triwulan IV Tahun 2025 mempunyai target adalah 99%, realisasi sebesar 100% dengan persentase 101,01%.

**Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan IV Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II	100%	100%	99%	100%	101,01%	-	-

## Kegiatan Pengendalian Mutu

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Pengendalian Mutu

Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yaitu Terselenggaranya Pengendalian Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. Sasaran Strategi 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.

Terselenggaranya Pengendalian Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM Jakarta II. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar lingkup Balai KIPM Jakarta II.

## IK5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Jakarta II

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar;

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji di laboratorium *official control*;

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Tahun 2025 indicator ini mempunyai target adalah 75 realisasi capaian kinerja sebesar 84,32 dengan persentase sebesar 112,43%. Dibandingkan dengan capaian kinerja

Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Jakarta II	83,10	84,32	75	84,32	112,43%	-	-

## **IK6. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II**

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Persyaratan Umum       | 4. Persyaratan Proses           |
| 2. Persyaratan Struktural | 5. Persyaratan Sistem Manajemen |
| 3. Persyaratan Sumberdaya |                                 |

Pada Tahun 2025 indicator ini mempunyai target adalah 75 realisasi capaian kinerja sebesar 89,75 dengan persentase sebesar 119,67%

**Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan IV Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Perse
Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Jakarta II	-	89,75	75	89,75	119,67%	-	-

### **Kegiatan Sekretariat BKIPM**

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Sekretariat BKIPM berasal dari satu sasaran strategis, yakni **Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, licah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan Lingkup Balai KIPM Jakarta II.**

### **Sasaran Strategis 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM.**

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, licah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan lingkup Balai KIPM Jakarta II menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Jakarta II. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang yang efektif, licah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan lingkup Balai KIPM Jakarta II.

## IK7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

Indikator yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiscal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Cara Perhitungan rumus sebagai berikut :

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

$$\sum_{n=1}^7 (Nilai Indikator_n \times Bobot Indikator_n) \div Konversi Bobot - Dispensasi SPM$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Indikator ini mempunyai target pada triwulan IV atau semester II tahun 2025 adalah 92 realisasi capaian sebesar 90,08 dengan persentase 97,91%, dibandingkan dengan realisasi triwulan IV tahun 2024 meningkat karena capaian output, penyerapan anggaran memenuhi kualitas hasil pelaksanaan anggaran Balai KIPM Jakarta II.

**Tabel 9** Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisa si	%	Target	Persen
Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	91,49	90,08	92	90,08	97,91	-	-

## **IK8. Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Balai KIPM Jakarta II**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Pada triwulan IV IKU ini mempunyai target adalah 71,50 dan realisasi anggaran adalah 100 dengan persentase sebesar 120%, dibandingkan dengan realisasi triwulan IV tahun 2024 meningkat disebabkan nilai efektifitas dan efisiensi capaian disetiap indikator mempunyai bobot kinerja anggaran pada Balai KIPM Jakarta II.

**Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 pada Triwulan IV Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Indikator kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT bala KIPM Jakarta II	91,49%	100	71,50	100	120%	-	-

## **IK9. Persentase Penyelesaian Temuan L H P BPK lingkup Balai KIPM Jakarta II**

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2024.

Cara Perhitungan rumus sebagai berikut :

NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2024}}{\text{100% Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2024}} \times$$

Pada triwulan IV tahun 2025 IKU ini mempunyai target 100%, capaian anggaran adalah 100% dengan persentase sebesar 100%.

**Tabel 11. Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan IV Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase Penyelesaian Temuan L H P BPK lingkup Balai KIPM Jakarta II	100	100	100	100	100%	-	-

#### **IK.10 Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II**

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesiannya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- Kualifikasi;
- Kompetensi;
- Kinerja; dan
- Disiplin.

dicapai, meliputi :

- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);

e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat;  
f. Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, maka terdapat beberapa penyesuaian dari dimensi Kualifikasi sebagai berikut:

1. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
2. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN.

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	<b>Diklat Struktural</b>	<b>15</b>	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	<b>Diklat Fungsional</b>	-	<b>15</b>	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	<b>Diklat 20 JP</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>22.5</b>
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	<b>Seminar</b>	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	<b>Total Mengikuti Kompetensi</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

Penyesuaian Kompetensi sebagai berikut:

- 1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
- 2) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau

nonklasikal;

- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

Penyesuaian dimensi Kinerja sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

• Nilai	• Nama Hukuman Disiplin	• Nilai
• Disiplin		• Disiplin
• 0	• Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	• 5
• R	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	• 3
• S	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	• 2
• B	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	• 1

Penyesuaian dimensi Disiplin yaitu: Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir, bukan 5 tahun lagi.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.
  - b. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan ketentuan sbb:
    - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
    - **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
    - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
    - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
    - Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.
  - c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;
  - d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.
- b. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
<b>91 – 100</b>	Sangat Profesional/sangat tinggi
<b>81 – 90</b>	Cenderung profesional/tinggi
<b>71 – 80</b>	Rentan tidak profesional/sedang
<b>61 – 70</b>	Cenderung tidak profesional/
<b>≤60</b>	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Pada Tahun 2025 IKU ini pada triwulan IV atau semester II dalam Perjanjian kinerja terdapat revisi target semula 86 menjadi 82, capaian anggaran adalah 83,22 dengan persentase sebesar 101,48%. Dibandingkan dengan semester II tahun 2024 menurun realisasi anggaran disebabkan penilaian bobot kompetensi mempengaruhi nilai kinerja pegawai ASN;

**Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 pada Triwulan IV Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024- 2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020- 2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	87,88	83,22	82	83,22	101,48%	-	-

## **IK11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II**

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Nilai Penilaian Mandiri Balai KIPM Jakarta II dihitung berdasarkan Permen

PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%).

## FORMULASI PERHITUNGAN

- Nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri **Sekretariat Es.1**
- atas implementasi SAKIP di (Unit Kerja Level 2)
- Kategori nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
<b>AA</b>	>90 – 100	Sangat Memuaskan
<b>A</b>	>80 – 90	Memuaskan
<b>BB</b>	>70 – 80	Sangat Baik
	>60 – 70	Baik
<b>CC</b>	>50-60	Cukup
	>30 – 50	Kurang
<b>D</b>	0 – 30	Sangat Kurang

Pada Tahun 2025 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 86, namun pada triwulan IV Tahun 2025 tidak ada target dan realisasi karena perhitungannya dilakukan secara tahunan.

**Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 pada Triwulan IV Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
<b>Nilai Penilaian Mandiri SAKIP</b>	82,15	86,25	86	86,25	100,29%	-	-

## IK12. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran. Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas,

Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam Three Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya. Pada Tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 85 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukan bahwa Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan IV Tahun 2025 telah menuntaskan 100 % perbaikan.

**Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 pada Triwulan IV Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra 2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	100	85	85	100	117,65%		

### **IK13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP UPT Balai KIPM Jakarta II (%)**

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Cara Perhitungan Rumus Sebagai Berikut :

**Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =**  
**Nilai Rencana Umum PBJ yang**  
**diagramkan pada SIRUP X 100% Pagu**  
**Pengadaan barang/jasa**

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Pada triwulan IV IKU ini mempunyai target 76% dan realisasi adalah 100% dengan persentase 120%.

**Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 pada Triwulan IV Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	84,34	100	76	100	120%		

#### **IK14. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)**

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

**Cara Pengukuran rumus sebagai berikut :**

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, meliputi

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada triwulan IV iku ini mempunyai target 70, realisasi anggaran adalah 75,14 dengan persentase sebesar 107,34%;

**Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 pada Triwulan VI Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	-	75,14	70	75,14	107,34%	-	-

### **IK15. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II**

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
- Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan

Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

### Cara Perhitungan Rumus Sebagai Berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Jumlah Unsur 9

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \times \text{Nilai penimbang Total unsur yang terisi}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: **IKM unit pelayanan x 25.**

Pada triwulan IV IKU ini terdapat revisi target perjanjian kinerja tahun 2025 semula 88 menjadi 3,36. Dan realisasi adalah 96,15 dengan persentase 120%, dibandingkan dengan TW IV tahun 2024 lebih meningkat realisasi capaian kinerja hal ini disebabkan adanya nilai total hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

**Tabel 17 Target dan Realisasi IK15 pada Triwulan IV Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	3,71	96,15	3,36	96,15	120,00%		

## 1.1 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Jakarta II pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar Rp. **8.751.993.000** dan pada triwulan IV tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. **7,956,986,508** atau sebesar **90,92 %** Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Jakarta II TW IV T.A 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 20 dan Tabel 21.

**Tabel 20. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan IV Tahun 2025**

No	KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN(Rp)	%
1	7010	Manajemen Mutu	610,420,000	586,290,920	96.05
2	3989	Pengendalian Mutu	220,240,000	40,102,000	18,21
4	3987	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPMHKP	7,921,333,000	7,330,593,588	92,54
<b>TOTAL</b>		<b>8,751,993,000</b>		<b>7,956,986,508</b>	<b>90,92</b>

**Tabel 21. Penyerapan Anggaran per Jenis Akun Triwulan IV Tahun 2025**

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	<b>3,898,420,000</b>	<b>3,520,297,898</b>	<b>(90.30%)</b>
2	Belanja Barang	<b>4,853,573,000</b>	<b>4,436,688,610</b>	<b>(91.41%)</b>
3	Belanja Modal	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>8,751,993,000</b>	<b>7,956,986,508</b>	<b>90.92%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV Tahun 2025 menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja Balai KIPM Jakarta II pada triwulan IV tahun 2025, yang tercermin dalam capaian indicator kinerja utama. Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)Triwulan IV sebesar 111,63%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Dari 15 Indikator Kinerja sudah tercapai sesuai target dan realisasi pada triwulan IV Balai KIPM Jakarta II.

#### **4.2 REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan IV tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal.

#### **4.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA**

**Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi Tahun 2024, yaitu :**

Perjanjian Kinerja pimpinan sudah disesuaikan dengan adanya perubahan organisasi dari BKIPM menjadi BPPMHKP, dimana fungsi karantina ikan sudah tidak tercantum lagi dalam Perjanjian Kinerja.

## **LAMPIRAN**

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) SALAI KIPM Jakarta II TRIWULAN IV TAHUN 2025

- Nama Sistem Strategis :** Penelenggaran Pengembangan dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautean dan Perikanan.
- Nama IKU 1 :** Peningembangan hasil kelautean dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UIII Bader KIPM Jakarta II.

IKU	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Realisasi	97,92	91,67	94,81	100	100	100	121,1	121,1	-
% Capaian	139,88	130,95	135,41	142,85	142,85	142,85	173	173	-

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, 2, 3 dan 4.

Sm. I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm. II = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian diakhiri tahun 2025.

**Ibu utama dan implikasi**

Presensi Hasil Kelautean dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautean dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CS16, CP16, CPP16, CPO16, COO16 dan perikanan tangkap meliputi CP16 di kegiatan yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kesehatan.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautean dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautean dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautean dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer menitik beratkan kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengolahan sumberdaya hayati perikanan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautean dan Perikanan mencakup kegiatan:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdelegan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

- Sertifikat Jaminan Mutu Hasil Kolaikan dan Perikanan Sektor Produk Primernya terdiri dari :
- Sertifikat Cara Pemangaman Ikan Yang Baik (CPIS) di atas Kegiat Perikanan
  - Sertifikat Cara Pemberian Ikan Yang Baik (CPIS)
  - Sertifikat Cara Sudi Daya Ikan Yang Baik (CSDIS)
  - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIS)
  - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIS)
  - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIS).

Triwulan IV tahun 2025 Selai KIPM Jakarta II mencapai 28 permohonan dan telah mewujudkan 28 Sertifikat Cara Pemangaman Ikan yang Baik (CPIS) Kegiat terdiri dari:

- KM. REJEKI MELIMPAH - 1
- KM. Wish Me Luck - 1
- KM. JAWA SENTOSA
- KM. SELALU MELIMPAH
- KM. TERANG LAUT
- KM. MITRA PRIMA 18
- KM. GISELLE
- KM. Marcell Jaya 29
- KM. Putri Sukses Mandiri 8
- KM. JIMMY WUAYA 04
- KM. Tahta Samudra
- KM. Neill - II
- KM. PUTRA SUKSES MANDIRI-5
- KM. CAHAYA TRIMARINE
- KM. Hasil Melimpah 9
- KM. Jaya Utama 7
- KM. Klat Maju Jaya 26
- KM. BINTANG SAM PURNA JAYA 5
- KM. Klat Maju Jaya 12
- KM. PUTRA SUKSES MANDIRI 2
- KM. Bintang Rozki 6
- KM. PUTRA SUKSES MANDIRI 1
- KM. Bintang Sampurna A
- KM. JIMMY WUAYA - 7
- KM. CHARLIE TUNA WUAYA - 3
- KM. CHARLIE TUNA WUAYA - 4
- KM. Hasil Melimpah 21
- KM. SARUNA JAYA SEJAHTERA

Triwulan IV tahun 2025 Selai KIPM Jakarta II mencapai 15 permohonan dan telah mewujudkan 15 Sertifikat dengan komoditi ijo dan nira, Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIS) terdiri dari:

- EDI SUSANTO (Perum Bumi Kotabaru Indah Blok A.2/5, Desa Panguluh Utara, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang)
- NOVAN WARDANI (Dusun Karangnigalem, RT.003/RW.005 Desa Pucung, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang)
- UHO SUHORI (Dusun Karangnigalem RT.002/RW.006 Desa Pucung, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang)
- KOSIM NURSEHA (Kago Timur RT.005/RW.004 Desa Muktijaya, Kec. Cilemaya Kulon, Kab. Karawang)
- SASDRI (Dusun I RT.001/RW.001 Desa Sumunggodo, Kec. Cilemaya Kulon, Kab. Karawang)
- ANDI SUGIANTO (Kp. Sukasari, Desa Sarimulya, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang)
- NURDIN FIRMANSAH (Dusun Selom, Desa Pasirkarumungan, Kec. Telagapaseri, Kab. Karawang)

6. DIANAWATI (Dusun 03 Pasirjoko, Desa Pasirjoko, Kec. Majalaya, Kab. Karawang)
7. MAMAN BUDI HARTONO (Dusun Rawadukuh, Desa Pasirbarung, Kec. Lomahabang, Kab. Karawang)
8. ERIK APRIANTO SINAGA (Kp. Cariu Barat, Dusun Cariu Barat, Desa Pengulih Utara, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang)
9. USUP SUPARMAN (Dusun Rawadukuh, Desa Pasirbarung, Kec. Lomahabang, Kab. Karawang)
10. M. JULIAN ALFATAH (Kp. Sabekan Jati, Desa Cikampak Timur, Kec. Cikampak, Kab. Karawang)
11. ARI MANDIRI (Dusun Noglesari, Desa Sedari, Kec. Cibuya, Kab. Karawang)
12. AHMAD JAENI DAHLAN (Kp. CISELANG RT.002 / RW.004, Desa Kerengjaya, Kec. Tirtamulya, Kab. Karawang)
13. UJANG MULYANA (Dusun Mengge Besar II, Desa Waleher, Kec. Kler, Kab. Karawang)

Triwulan IV tahun 2025 salah KIPM Jakarta II moncerima 13 permohonan dan telah mewujudkan 13 Sertifikat Caca Budidaya ikan yang baik (CB15) terdiri dari:

1. Apriana Ramdani (Nila)
2. Adul (Lolo)
3. Maedidam (Nila Merah)
4. Rendi Kurniawan (Lolo)
5. Hacnudin (Lolo)
6. Rusli Hasanudin Tambunan (Lolo)
7. Abdul Majid (Lolo)
8. Pt. Rium Agro Lestari (Udang Vaname)
9. Hasanah (Lolo)
10. Abdul Rosyid (Lolo)
11. Fachrial Noviana Taufik (Nila)
12. Abdur Rachman Asy'ali (Nila)
13. Meeta (Udang Vaname)

Triwulan IV tahun 2025 salah KIPM Jakarta II belum moncerima permohonan Sertifikat Caca Pembuatan Pakan ikan yang baik (CPP15), sehingga pada triwulan ini belum melakukan sertifikasi terhadap ruang lingkup tersebut.

Triwulan IV tahun 2025 salah KIPM Jakarta II belum moncerima permohonan Sertifikat Caca Pembuatan Obat ikan yang baik (CPO15), sehingga pada triwulan ini belum melakukan sertifikasi terhadap ruang lingkup tersebut.

Triwulan IV tahun 2025 salah KIPM Jakarta II moncerima 1 permohonan Sertifikat Caca Distribusi Obat ikan yang baik (CDO15), dan telah mewujudkan 1 permohonan sertifikat tersebut atas nama PT CHEIL JEDANG BIO INDONESIA.

Capatan iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D}{A+B+C+D} \times 100\%$$

**X** = Persentase hasil keluaran dan penjualan sektor produksi primari yang memenuhi standar Mutu dan Keamanan pangan  
**A** = Persentase Unit Usaha yang moncerikan CB15  
**B** = Persentase Unit moncerikan CPP15  
**C** = Persentase Unit Usaha yang moncerikan CPO15  
**D** = Persentase Unit Usaha moncerikan CDO15

<p>E = Persentase Unit Usaha mencapai CPQIS yang memenuhi standar mutu dan kemanan gangan</p> <p>F = Persentase Unit Usaha mencapai CPQIS Kepala=Jumlah dari unsur pembentuk (8)*</p> <p><b>Akar Masalah</b> tidak tersedia anggaran guna menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan.</p>
<p><b>Tindakan yang telah dilaksanakan</b></p> <p>UPT Balai KIPM Jakarta II telah mengusulkan kepada pusat-pusat terkait, pengusulan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan Tusi</p>

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan gerakan kepada Pusat agar dapat dilaksanakan anggaran gerakan guna mendukung pelaksanaan sertifikasi.	Ketua Tim Kerja Produk Primer Balai KIPM Jakarta II.	TWS 4 tahun 2023

Sertifikat CPB Kapal Triwulan IV



REMENTERAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BAGAN PENGENDALIAN DAN PERBAIKAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Ministry of Marine Affairs and Fisheries  
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SELEKTAH CARA PERANGKARAN BAGUS TANG BIK  
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NO: ID-CPB-K-31-2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Standar Kepatuhan Usaha dan Produk dalam Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Risiko untuk Sektor Lautan dan Perikanan  
Based on Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 10 of 2001 laying down Standard for Business Activities and Products in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector  
I certify that

Kapal Penangkap	: JIMMY WIJAYA 54
Fishing Vessel	
Nama	: Transat Timur No. 24, PPP Muara Baru, Kel. Penjaringan,
Alamat	Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Utanah Kapal	: 97 GT
Size of fishing vessel	
Tipe Kapal	: Kapal Penangkap
Type of fishing vessel	
Tangkap Ikan	: 25 November 2025
Asuransi Ikan	: 25 November 2025
Jenis Ciri-ciri	: Tuna Botol, Ikan Patogen Botol, Canned Sardine, Frozen Tuna, Frozen Patogen Fish, Frozen Canned Sardine
Community	
Contoh Produk	
Dokumen	

Dinyatakan bahwa memenuhi persyaratan Cara Perangkaran Bagus Tang Biki  
Is deemed to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Disertakan di : Jakarta  
Issued in : Jakarta  
Pada Tanggal : 21 November 2025  
Oleh : 21 November 2025  
Bantuan : 21 November 2025  
Valid sampai : 21 November 2027

Kepala BPPNBI BZC  
Director General of MFOA





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BAGIAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BUDU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Ministry of Marine Affairs and Fisheries  
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SELEKTAH CARA PENINGKATAN BUDU YANG BAIK  
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CRIB - K - 31 - 20228

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang  
Standar Kepuatan, Uraian, dan Produk pada Penyusunan, Penyampaian, Penyelesaian  
berdasarkan sektor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar berasaskan pada praktik terbaik dalam  
penerapan standar bisnes berdasarkan sektor.

Di sertifikasi bahwa

Kepala Perusahaan  
Fishing vessel : TAHTA SAMUDRA  
Nama : Jl. Pahl. Thamrin Blok LNo. 24, Ds. Kel. Kebon Sirih,  
Kec. Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta  
Alamat : 168 GT  
Urusan Kapal  
Basis of fishing vessel : Kapal Penangkap  
Type of vessel : Fishing Vessel  
Tanggal inspeksi : 04 November 2022  
Inspeksi date : 04 November 2022  
Jenis Produk : Tuna Bokor, Tuna Pausia Bokor  
Community : Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish  
Perihal inspeksi : 6  
Grade : Grade A

Dinyatakan bahwa inspeksi penerapan Cara Peningkatan Budu yang Baik  
(Good Handling Practices) dilaksanakan diatas standar diatas.

Diketahui di : Jakarta  
Tanggal : 24 November 2022  
Ditulis di : 24 November 2022  
Ditulis dengan : 24 November 2022  
Valid sampai : 24 November 2027

Kepala BPPMS/BOE  
Director General of MFQAA





MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Ministry of Marine Affairs and Fisheries  
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency  
SERTIFIKAT CARA PERANGANAN IKAN YANG BAIK  
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 31 - 251213

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kepelautan Usaha dan Produk pada Penyelemparan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan  
Based on Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa

to certify that

Kapal Perikanan

Fishing Vessel

Alamat

Address

: NAILI II

: Pelabuhan Samudera Nicam Zachman Transid Shed  
No. 10 B Dermaga Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara,  
Desa/Kelurahan: Penjaringan, Kec. Penjaringan,  
Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Ukuran Kapal

Size of fishing vessel

Type Kapal

Type of fishing vessel

Tanggal Inspeksi

Inspection date

Jenis Produk

Commodity

Potongan/potongan

Grade

: 115 GT

: Kapal Penangkap

Fishing Vessel

: 06 November 2025

: 06 November 2025

: Tuna Beku, Ikan Pelagic Beku

Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish

: B

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Peranginan Ikan yang Baik  
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta

Alamat :

Tanggal : 24 November 2025

Date : 24 November 2025

Berlaku sampai : 24 November 2027

Valid until : 24 November 2027

Kepala BPPMHKP  
Director General of MFQAA



Ir. J. Hartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BANDAR PENGETAHUAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs and Fisheries  
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK  
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 31 - 251200

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kewajiban Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perikanan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan  
Based on Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries  
Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa

to certify that

Kapal Perikanan  
Fishing Vessel  
Alamat  
Address

Ukuran Kapal  
Size of fishing vessel

Type Kapal  
Type of fishing vessel

Tanggal Inspeksi  
Inspection date

Jenis Produk  
Commodity

Pertimbangan  
Grade

PUTRA SUKSES MANDIRI 5

: Imigrasi Office, Ruko Permata Regency Blok D Nomor 37,  
Jalan Haji Kalik, Desa/Kelurahan Shenggung,  
Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat,  
Provinsi DKI Jakarta

: 195 GT

: Kapal Penangkapan

Fishing Vessel

: 07 November 2025

: 07 November 2025

: Tuna Belut, Ikan Pelagis Belut

Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish

: B

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik  
is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta

Issued in : Jakarta

Pada tanggal : 20 November 2025

Date : 20 November 2025

Berlaku sampai : 20 November 2027

Valid until : 20 November 2027

Kepala BPPM-HKP  
Director General of MFQAA

H. Ishartini





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs and Fisheries  
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK  
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 31 - 251219

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Bisnis Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan  
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector  
menetapkan bahwa  
to certify that

Kapal Perikanan  
Fishing Vessel

Alamat  
Address

CAHAYA TRIMARINE

Jl. Muara Baru Utung Blok O Kaw 1-2, Desa/Kurukuran  
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara,  
Provinsi DKI Jakarta

Ukuran Kapal  
Size of fishing vessel

Tipe Kapal  
Type of fishing vessel

Tanggal Inspeksi  
Inspection date

Jenis Produk  
Commodity

Pemanfaatan  
Grade

: 148 GT

: Kapal Penangkap

Fishing Vessel

: 08 November 2025

: 08 November 2025

: Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku

Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish

: B

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik  
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta

Issued in

Tanggal/Tempat : 24 November 2025

Date : 24 November 2025

Berlaku sampai : 24 November 2027

Valid until : 24 November 2027

Kepala BPPMI-KP  
Director General of MFQAA



J. Ismartini

Sertifikat CPIB Pemberian Triwulan 4



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK  
PB-UMKU: 270225003930100010002

Pemerintah Republik Indonesia memberikan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                    | : AHMAD JAHRI DAHLAN  |
| 2. Nomor Indent Berusaha (NIB)          | : 2702250039301   |
| 3. Alamat Kantor                        | : KP CISELANG RT/RW 02/04 DESA/KARANGJAYA KEC.TIRTAMULYA KODE POS: 41372, Desa/Kelurahan Karangjaya, Kec. Tirtamulya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: |
| 4. Status Penerapan Model               | : Penerapan Model Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Buku Lapangan Usaha | : 03228 - Pemberian Ikan Air Tawar Indonesia (KBL)  |
| 6. Lokasi Usaha                         | : Desa Pengulih Usaha RT.001 RW.001 Candi Barat Desa/Kelurahan Pengulih Usaha, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 41374                  |

Tuliskan Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan urutan tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut diwajibkan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 29 Oktober 2020

an. Menteri Kewilayahan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Minyak  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Oktober 2020

1. Dokumen ini dibuat dalam CDR berdasarkan data dari Publik Serta, berdasarkan data dalam sistem UMKU yang dimiliki oleh perangkat pusat dan provinsi.  
2. Dokumen ini dapat diakses dan diolah dalam format portofolio informasi investasi.  
3. Dokumen ini tidak diperbolehkan untuk dicetak secara elektronik menggunakan teknologi yang dilakukan oleh Bapak Sertifikat Elektronik.



Bapak  
Sertifikat  
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK  
LAMPIRAN PB-UMKU: 270225003930100010002

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kehutanan dan Perikanan, menetapkan Peraturan:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Nomor Referensi Teknis          | 1. ID-CPB-T-32-200132                           |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Bantuan | 2. Desa Pangulu Utara Rt.001 Rw.001 Cenur Berat |
| 3. Komoditas                       | 3. Benih Kain Nila                              |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat         | 4 (empat) tahun sejak diberikan                 |
| 5. Gradi                           | BAIK  |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Perizinan tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Data berupa informasi berbentuk teks, angka dan simbol-simbol yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
2. Data berupa informasi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
3. Data berupa informasi yang bersifat kuantitatif.
4. Data berupa informasi yang bersifat kuantitatif.
5. Data berupa informasi yang bersifat kuantitatif.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK  
PB-UMKU: 090422001356900070002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                   | : PT MINAMAS SEDARI MANORI  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)          | : 0904220013569   |
| 3. Alamat Kantor                       | : DUSUN NEGLASARI, Desa/Kelurahan Sedati, Kec. Cibuya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 41356              |
| 4. Status Penanaman Modal              | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Laporan Usaha | : 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar<br>Indonesia (KBLI)   |
| 6. Lokasi Usaha                        | : Dusun Neglasari Rt.002 Rw.004 Desa/Kelurahan Sedati, Kec. Cibuya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 41356 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan peralatan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan urusan tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulari pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut diwajibkan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 Oktober 2025.

a.n. Menteri Kehutanan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Tinjauan  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Oktober 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK  
LAMPIRAN PB-UMKU: 090422001356900070002

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nomer Referensi Teknis        | : ID-CPB-T-32-250131                |
| 2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan | : Desa Naglaari Rt.002 Rw.004       |
| 3. Komoditas                     | : Benih Ikan Nila                   |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat       | : 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade                         | : BAIK                              |

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK  
PB-UMKU: 110524001566600020001

Pemerintah Republik Indonesia memberikan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini.

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                    | : MUHAMMAD JULIAN ALFATH  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)           | : 110524015666  |
| 3. Alamat Kantor                        | : Kp. BABAKAN JATI, Desa/Kelurahan Cikampak Timur, Kec. Cikampak, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat                                |
| 4. Status Penanaman Modal               | : Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN)  |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 05226 - Pembenihan Ikan Air Tawar Indonesia (KBLI)  |
| 6. Lokasi Usaha                         | : Kp. Babakan Jati RT 03/ RW 04 Desa/Kelurahan Cikampak Timur, Kec. Cikampak, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 41374 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

- NIB
- Data unit pembenihan ikan
- Gambar layout bangunan dan peralatan unit pembenihan ikan
- Struktur organisasi dan tugas
- Standar operasional prosedur dan formulir pendataan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 Oktober 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Tinjauan  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Oktober 2025

1. Dokumen ini dibuat dan valid oleh OSS berdasarkan data dari Pendaftaran Investasi dalam online OSS, yang dimuat dengan izin Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal tidak kesesuaian atau ketidakvalidan dalam status atau peraturan teknis dan investasi.  
3. Dokumen ini tidak akan dibatasi secara teknis mengacu pada teknologi yang ditentukan oleh BNPB-SKRI.  
4. Data yang ada pada Perizinan Berusaha dapat diakses melalui sistem OSS menggunakan link diatas.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK  
LAMPIRAN PB-UMKU: 110524001566800020001

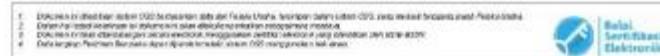
Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- |                                 |   |                                   |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomer Referensi Teknis       | : | ID-CP-IB-T-32-250130              |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | Kp. Babakan Jati RT 03/ RW 04     |
| 3. Komoditas                    | : | Benih Ikan Nila                   |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat      | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade                        | : | BAIK                              |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Sertifikat CBIB Triwulan 4



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK  
PB-UMKU: 110925009978300000001

Pemerintah Republik Indonesia memberikan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha  | : ABDIUR RAHIMAN ASY'ALI  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)   | : 1109250099783   |
| 3. Alamat Kantor  | : PERUM SARASWATI I BLOCK A 57, Desa/Kelurahan Cikampak Selatan, Kec. Cikampak, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat  |
| 4. Status Penanaman Modal   | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 03221 - Pembesaran ikan Air Tawar Di Kolam Indonesia (KBLI) |   |
| 6. Lokasi Usaha   | : Perum Saraswati Blok A 57 Desa Cikampak Selatan, Kecamatan Cikampak, Kab. Karawang, Desa/Kelurahan Cikampak Selatan, Kec. Cikampak, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 41333 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan pelabuhan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan urusan tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan Kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 29 Oktober 2025

a.n. Memberi Keleluasaan dan Perkembangan  
Menteri Investasi dan Tinjauan  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Oktober 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK  
LAMPIRAN PB-UMKU: 110925009978300000001

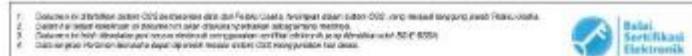
Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, mewajibkan bahwa:

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Referensi Teknis       | : | ID-CBIB-T-32-250430   |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | Perum Sarsawati Blok A, 57 Desa Cikampak Selatan, Kecamatan Cikampak, Kab. Karawang |
| 3. Komoditas                    | : | Nila (Oreochromis sp.)  |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat      | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan   |
| 5. Grade                        | : | Sangat Baik   |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK  
PB-UMKU: 220722000636700010001

Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : Fachrizal Noviane Taufik  
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2207220006367  
3. Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 12, Desa/Kelurahan Serimulya, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos : 41374  
4. Status Perusahaan Modal : Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN)  
5. Kode Klasifikasi Baku Lepangan Usaha : 03221 - Pembiakan Ikan Air Tawar Di Kolam  
Indonesia (KBLI)  
6. Lokasi Usaha : Kampung Sukatani Desa/Kelurahan Pengulih Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos: 41374

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit perusahaan/ikan
3. Gambar layout bangunan dan peralatan unit/pembentahan ikan
4. Struktur organisasi dan urusan tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembentahan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha berundang di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan tanggal: 29 Oktober 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Himpunan  
Kepala Badan Koordinasi Peranaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Oktober 2025

1. Dokumen ini dilindungi sistem GDS berdasarkan aturan Pelaku Usaha, Izinbergan dalam online GDS, yang merupakan pengamanan  
Pelaku Usaha.  
2. Dokumen ini tidak boleh diubah atau dituliskan pada bagian isi atau bagian penutupan pengamanan ini.  
3. Dokumen ini tidak boleh diunggah ke media sosial, meskipun dengan izin tertulis.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK

LAMPIRAN PB-UMKU: 220722000636700010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, melaporkan bahwa:

- |                                 |   |                                   |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis       | : | ID-CBIB-T-32-250429               |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | Kampung Sukatani                  |
| 3. Komoditas                    | : | Nila (Oreochromis sp.)            |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat      | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade                        | : | Baik                              |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibuatkan dalam CDR dan diketahui oleh dan Tidak Laku. Nomor Dokumen: 220722000636700010001  
2. Dokumen ini tidak boleh diubah, diataskan, atau diolah tanpa izin sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini tidak dibolehkan untuk dijadikan sebagai bukti pengaduan dan/atau bukti pengadilan.  
4. Dokumen ini dibuatkan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK  
PB-UMKU: 090725003739600010001

Pemerintah Republik Indonesia menarikkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                    | : | ABDUL ROZIHD  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)           | : | 0907250037396   |
| 3. Alamat Kantor                        | : | GRIYA PESONA ASRI D5/31, Desa/Kelurahan Cibalongsa, Kec. Klat, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat                   |
| 4. Status Penanaman Modal               | : | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : | 03221 - Pembesaran ikan Air Tawar Di Kolam Indonesia (KBLI)   |
| 6. Lokasi Usaha                         | : | GRIYA PESONA ASRI D5/31 Desa/Kelurahan Cibalongsa, Kec. Klat, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 41371 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembesaran ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran ikan
4. Struktur organisasi dan urutan tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 06 November 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Hibahnas  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 November 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK  
LAMPIRAN PB-UMKU: 090725003739600010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- |                                 |   |                                   |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis       | : | ID-CBIB-T-32-250488               |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | GRYIA PESONA ASRI D5/31           |
| 3. Komoditas                    | : | Lele (Chanos sp.)                 |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat      | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade                        | : | Cukup                             |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah memerlukan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK  
PB-UMKU: 026201101245800010001

Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha:	: MASTA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB):	: 0262011012458
3. Alamat Kantor:	: DUSUN MEKAR JAYA, Desa/Kelurahan Tanjungpaku, Kec. Pakujaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
4. Status Penanaman Modal:	: Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : KELU	: 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau Indonesia (KELU)
6. Lokasi Usaha:	: Dusun Mekarjaya RT.001 / RW.010 Desa/Kelurahan Tanjungpaku, Kec. Pakujaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
	: Kode Pos: 41356

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian izin
3. Gambar layout bangunan dan pekerjaan unit pemberian izin
4. Struktur organisasi dan unit-unit fungsional
5. Standar operasional prosedur dan formulir pendaftaran pemberian izin

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di wajib menjembahkan segelintir waktunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 06 November 2025

an. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Mikrofinansial  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 November 2025

7. Dokumen ini tidak akan valid jika berada di luar Wilayah Negara, kecuali dalam halnya UU RI, yang diizinkan dengan izin  
Pelaku Usaha.  
2. Dokumen ini berlaku sejak tanggal ini dan akan berakhir pada tanggal pengajuan atau inspeksi.  
3. Dokumen ini tidak akan berlaku jika dilakukan perubahan terhadap dokumen yang ditandatangani oleh BPKP BKKBN.  
4. Dokumen ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani oleh Pelaku Usaha.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK  
LAMPIRAN PB-UMKU: 026201101245800010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, mewajibkan bahwa:

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Referensi Teknis       | : | ID-CBIB-P-32-250454                             |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | Dusun Mekarjaya RT001 / RW.010                  |
| 3. Komoditas                    | : | Udang vannamei ( <i>Lithopenaeus vannamei</i> ) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat      | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan               |
| 5. Grade                        | : | Baik  |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK  
PB-UMKU: 026201101245800010001

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha  | : MASTA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)   | : 0262011012458  |
| 3. Alamat Kantor  | : DUSUN MEKAR JAYA, Desa/Celuruh/Tanjungpaku, Kec. Pakajaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat.<br>Kode Pos:                      |
| 4. Status Penanaman Modal   | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 03264 - Pembesaran Crustaceae Air Payau<br>Indonesia (KBLI) | : Dusun Mekarjaya RT.001 / RW.010, Desa/Celuruh/Tanjungpaku, Kec. Pakajaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat.<br>Kode Pos: 41355 |
| 6. Lokasi Usaha   |  |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakian unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan urusan tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 06 November 2025

a.n. Memberi Kelaauan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Minasir  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.



Diandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 November 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK  
LAMPIRAN PB-UMKU: 026201101245800010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, mendapatkan bermacam:

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Nomer Referensi Teknis      | : | ID-CBIB-P-32-250454                           |
| 2. Alamat Tempat Budidaya Ikan | : | Dusun Mekarjaya RT.001 / RW.010               |
| 3. Komoditas                   | : | Udang vannamei ( <i>Lophenaeus vannamei</i> ) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat     | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan             |
| 5. Grade                       | : | Baik  |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibuatkan dalam C2B di tanggal 08-06-2021 Tgl. Jadi. Terimakasih telah ikut C2B, dan terima kasih yang telah membaca kita.  
2. Dokumen ini hanya dibuatkan untuk sertifikasi cara budidaya ikan yang baik.  
3. Dokumen ini hanya dibuatkan untuk sertifikasi cara budidaya ikan yang baik.  
4. Dokumen ini hanya dibuatkan untuk sertifikasi cara budidaya ikan yang baik.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Sertifikat CDOIB Triwulan 4



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK**  
**(CDOIB)**  
**PP UMKM: 121700071076800130001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Marjani Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Perizinan Berusaha Untuk Mengajang Kegiatan Usaha (PUMPU) yang merupakan Sertifikat Cara Ditolikha Olah Iken yang Baik (CODEI)

**Nama Perusahaan** : PT CIBEL JEDING BIR INDONESIA  
**Nomor Induk Berusaha (NIB)** : 1217000719798  
**Alamat Kantor** : GEDUNG MENARA BRIAMOGSTEK LANTAI 21, JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 36, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kecamatan Peta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12110  
**Status Penetapan Model** : Peraturan Menteri Aset (PMA)  
**Nomor Telepon** : 02162999999  
**Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia** : 46444 - Perdagangan Besar-Dest Farmasi Untuk Hewan (KBLI)  
**Lokasi Usaha** : Cibatu Smart Logistic - Warehouse 02, Greenland International Industrial Center (GIIC) Blok ED No. 1, Kec. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17139

Tujuh Memerlukan Persyaratan:

1. Nonst. Induk Berdasarkan
2. Sumber sio (jalan guguran dan tata kota) (sebut) ranjang
3. Misi & saran pengangguran yang akut dan memerlukan sediaan obatkan
4. Formulir cara dan persyaratan CDDB yang teliti dili
5. Personel penit merdapatkan pelatihan CDDB atau sudi pnyatakan memahami prinsip-prinsip CDDB
6. Untuk cldgkhan merdikan pelatihan

Lampiran Parzinen Berusaha Untuk Meningkatkan Kegiatan Usaha III memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suraun ini. Paruus Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Desember 2005

a.n. Membentuk Kelaauan dan Perikanan  
Membentuk Investasi dan Himpunan  
pada Badan Koordinasi Penerapan Model

For more information, contact the Office of the Vice President for Research and Economic Development at 319-273-2500 or [research@uiowa.edu](mailto:research@uiowa.edu).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**LAMPIRAN PB-UMKU: 121700071078800130001**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOI8)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, memuatkan bahawa:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nomer Referensi Teknis  | : ID-CDOI8-32-250014                   |
| 2. Kategori                | : P1 (Pengawasan 1 kali dalam 4 tahun) |
| 3. Masa Berlaku Sertifikat | : 4 (empat) tahun sejak diterbitkan    |

Pasal 8a Diimbau Obat Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOI8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II**  
JALAN SWASEMBADA TIMUR XIII NO. 64, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14320  
TELEPON (021) 43903634, 4371604, FAKSIMILE (021) 43903634  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [bkpmjakarta2@kkp.go.id](mailto:bkpmjakarta2@kkp.go.id)

**SURAT PENGANTAR**

NOMOR B.45/BKIPM.JKT.II/KP.440/I/2026

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	IKU.1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV Tahun 2025.	1 (satu) berkas.	Disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Januari 2026

Surat Jawab Laporan  
  
Nindya Hambar Wasisto, S.Pi.,M.Si

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2025**

<b>Nama Bacaan Strategic</b>	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
<b>Nama IKU 2</b>	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II						

TIR	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2026
	Q1	Q2	8m.I	Q3	Q4	8m.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70		70
Realisasi	99,5 %	98,5 %	99 %	99 %	97,5 %	86,26	87,125	87,125	-
% Capaian	142,14%	140,71%	141,42%	132,85%	133,29%	136,07%	133,73%	133,73%	-

**Catatan :**

- Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
- Bm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2
- Bm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
- Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

**Isu Utama dan Implikasi**

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pascapanen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pascapanen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diberikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan memastikan untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pascapanen merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
  1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
  2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
  3. Standar lainnya yang diperlukan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah

Bertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen :

- A. Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B. Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikanakala UMKM dan menengah besar yang menepati GMPSSOP

a. Persentase penerbitan HACCP ruang lingkup produk pada triwulan IV adalah 100 sertifikat dan permohonan pengajuan skp sebanyak 306 dari 59 UPI dan tidak ada penolakan, sudah terealisasi 100% skp yang diterbitkan.

b. Persentase Penerbitan HACCP ruang lingkup produk dan persentase SKP yang diterbitkan pada triwulan IV sudah terealisasi sebesar 97,5% dengan capaian persentase adalah 139,28%.

c. Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B}{x_m} \times 100\%$$

$\%X$  = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikanakala UMKM dan

menengah besar yang menepati GMPSSOP

$x_m$  = Jumlah dari unsur pembentuk (2\*)

$$\%X = \frac{A+B}{x_m} \times 100\% = \frac{97,5+100}{2} \times 100\% = 97,5 \%$$

<b>Akar Masalah</b>
<b>Tindakan yang telah dilaksanakan</b>

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
	Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Tw.4 Tahun 2025

DAFTAR UPI DAN SERTIFIKAT TRIWULAN IV 2025

TABEL DAFTAR LEMBAGA PENELITIAN DI INDONESIA

No	Tanggal Inspeksi	Tanggal	Nama UPI/UPRL	Alamat	Jenis Produk	Status
1	1 Oktober 2025	2 Oktober 2025	(CV) PRIMA TEGUH (skala kecil)	Komplek Duta Harapan Indah Blok QQ No.4 RT 008 RW 002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Sirip Hiu Kering, Kulit Hiu Kering, Tulang Hiu Kering 2. Sirip Pari Kering, Kulit Pari Kering, Tulang Pari Kering 3. Teripang Kering Gelembung Ikan Kering	Perpanjangan
2	1 Oktober 2025	1 Oktober 2025	PT. SAFARI SETIA INDONESIA (skala menengah)	Pelabuhan Nizam Zachman, (room 01) Jl. Tuna IV No.77, Desa/Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Daging Tetelan Tuna Beku 2. Ikan Pelagis Beku 3. Ikan Demersal Beku 4. Cumi-cumi Beku 5. Salmon Beku, Trout Beku	Baru
3	1 Oktober 2025	1 Oktober 2025	PT. ARUNIKA, SWARA NUSANTARA (skala menengah)	(room 02), Jalan Tuna IV No.77 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Daging Tetelan Tuna Beku 2. Ikan Pelagis Beku 3. Ikan Demersal Beku 4. Cumi-cumi Beku 5. Salmon Beku, Trout Beku	Baru
4	1 Oktober 2025	2 Oktober 2025	CV. VICTORY FRIENDSICLE (skala kecil)	Jl. Tuna 2 Blok K No. 7B Room B Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Makarel Beku	Baru

5	2 Oktober 2025	7 Oktober 2025	PT NUTICA PRIMA PERKASA (skala menengah)	Jl. Yos Sudarso Kav. 46-48 Blok C/24 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Ikan Beku Pelagis	Baru
6	3 Oktober 2025	3 Oktober 2025	PT. Triguna Lestari Sejahtera (skala menengah)	Kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jl. Dermaga Ujung/Pendaratan Ikan, RT005/RW003, No. 5 (CS - Room 2) Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Ikan Pelagis Beku 2. Cephalopoda Beku	Baru
7	3 Oktober 2025	3 Oktober 2025	PT. MENARA BAHARI NUSANTARA (skala kecil)	Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, II, Pendaratan Ikan RT.005/RW.003 (Room CS1), Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Cumi-cumi Beku 2. Ikan Pelagis Beku	Baru
8	3 Oktober 2025	4 Oktober 2025	PT. JALIA SEMERUAN (skala menengah)	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jl. Tuna Raya No. 3A Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Ikan Pelagis Beku 2. Tuna Beku	Baru

9	6 Oktober 2025	7 Oktober 2025	ARTA MINA TAMA (skala Kecil)	Jl. Cumi Raya Blok E No.1A PPS Nizam Zachman Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Tuna Beku 2. Ikan Demersal Segar 3. Tuna Segar 4. Cephalopoda Beku 5. Salmon Beku 6. Hiu Beku 7. Ikan Pelagis Beku 8. Ikan Demersal beku	Perpanjangan
10	10 Oktober 2025	10 Oktober 2025	(PT) MITRA LAUT INTERNASIONAL (skala menengah)	Jl. Pendaratan Udang Gudang Unit Pengolahan Ikan No.3 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Cephalopoda Beku 2. Salmon Beku 3. Ikan Demersal Beku 4. Ikan Pelagis Beku	Perpanjangan
11	13 Oktober 2025	14 Oktober 2025	PT. CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK (skala besar)	Jl. Muara Baru Ujung Blok K No. 7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Cephalopoda Beku 2. Ikan Demersal Beku 3. Tuna beku 4. Salmon Beku 5. Salmon Beku, Trout Beku 6. Hiu Beku 7. Kerang Beku 8. Ikan Pelagis Beku 9. Sirip Hiu Beku	Perpanjangan
12	13 Oktober 2025	16 Oktober 2025	PT. QFI PRIMA MANDIRI (skala kecil)	Jl. Cakung Cilincing Timur, Type Biz-C1 Hook, Blok Green Sedayu 17, No. 001 Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur DKI Jakarta	1. Salmon segar, Trout segar 2. Salmon Beku, Trout Beku 3. Cumi-cumi Beku 4. Ikan Pelagis Beku 5. Scallop Beku	Perpanjangan

13	13 Oktober 2025	14 Oktober 2025	PT. ANDIRA INTERNUSA GEMILANG (skala besar)	Jl. Jawa Blok G-1 Kel. Ganda Mekar, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	1. Ikan Pelagis Beku 2. Ikan Demersal Beku 3. Cephalopoda Beku 4. Daging Tuna Beku 5. Salmon Beku	Perpanjangan
14	15 Oktober 2025	16 Oktober 2025	PT. ANUGERAH MINA SEJAHTERA (skala besar)	Jl. Tuna VI Blok A No.2 Muara Baru Ujung Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI 14440	1. Ikan Pelagis Beku 2. Tuna Beku 3. Ikan Bandeng Beku 4. Ikan Air Tawar Beku 5. Salmon Segar, Trout Segar 6. Ikan Demersal Beku 7. Hiu Beku	Perpanjangan
15	17 Oktober 2025	20 Oktober 2025	PT. MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCES (skala besar)	Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Centre, Blok F, No. 7,8,9, Marunda Makmur Kel. Sagara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	1. Tepung Agar-agar 2. Tepung Alginat 3. Tepung Karagenan	1-2 perpanjangan 3Baru
16	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	PT. TRITUNGKAI LINTAS BENUA (skala besar)	Jl. Tekno 1 Kawasan Industri Jababeka III B 1 L Kel. Pasir Gombong, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	1. Tuna Beku 2. Ikan Pelagis Beku 3. Ikan Demersal Beku 4. Scallop Beku 5. Salmon Beku, Trout Beku 6. Salmon Segar, Trout Segar 7. Cephalopoda Beku	Perpanjangan
17	23 Oktober 2025	24 Oktober 2025	PT. KEMBANG ALAM KHATULISTIWA (skala menengah)	Jl. Muara Baru Ujang Blok T No. 11-12 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Ikan Pelagis Bersifat Tambahan Beku	Baru

18	23 Oktober 2025	27 Oktober 2025	PT. NUTRINDO INTERFARMA SEJAHTERA (skala besar)	Jl Sungkai 1 blok F 26 no 8 Kel. CICAU, Kec. CIKARANG PUSAT, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	3. Minyak Ikan	Baru
19	28 Oktober 2025	29 Oktober 2025	PT. CLASSIC FINE FOODS INDONESIA (skala besar)	Komplek Pergudangan Bgr. Jl. Boulevard Bgr No.01 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Tiram Segar 2. Kerang Masak Beku 3. Gurita Rebus Beku 4. Ikan Demersal Utuh Beku 5. Kepiting Masak Beku 6. Kepiting Beku 7. Telur Ikan Sturgeon Segar 8. Telur Ikan Sturgeon Beku 9. Kerang Rebus Dingin	Baru
20	29 Oktober 2025	30 Oktober 2025	PT. AWINDO INTERNATIONAL (skala menengah)	Jl. Cumi Raya No.7 Pelabuhan Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara	1. Tuna Beku 2. Ikan Pelagis Beku	Perpanjangan

No	Tanggal Inspeksi	Tanggal Sertifikat	Nama UPI/UPRL	Alamat	Jenis Produk	Status
1	3 November 2025	4 November 2025	PT. GABUNGAN ERA MANDIRI (I) (skala menengah)	Jl. Tuna II Blok J No 4 Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Cephalopoda Beku 2. Abon Ikan 3. Tuna Beku 4. Tuna Loin Masak Beku 5. Ikan Pelagis Reku	Perpanjangan
2	5 November 2025	6 November 2025	PT. DKSH INDONESIA (skala besar)	Jl. Caringin No.03 RT.001 RW.004 Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi Jawa Barat	1. Tepung Tulang Ikan 2. Tepung Agar-agar 3. Seaweed Flakes/Powder 4. Sodium Alginat 5. Omega 3 Acid Ethyl Ester 90 Oil 6. Minyak Salmon 7. Tepung Karagenan 8. Asam Alginat	1-7 Perpanjangan 8 Baru
3	10 November 2025	11-11-2025	PT. UNIMITRA ANDALAN SEJATI (skala besar)	Jl. Tekno 1 Kawasan Industri Jababeka III Kel. C.3.B Pasir Gombong, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	1. Salmon Segar, Trout Segar 2. Fillet Ikan Pelagis Segar 3. Scallop Beku	Perpanjangan
4	11 November 2025	12 November 2025	BEKASI PRESTO (skala mikro)	Jl. Raya Pasar Babelan No 45 RT.01 RW.01 Kel. Babelas, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	1. Otak-otak Bandeng 2. Bakso Ikan 3. Tahu Bakso Ikan 4. Bandeng Presto	Perpanjangan Baru Baru Perpanjangan

5	12 November 2025	13 November 2025	PT. LOLA MINA (skala besar)	Jl. Muara Baru Ujung Blok N Kaw. 5-6 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara	1. Udang Beku 2. Cumi-cumi Beku	Perpanjangan
6	12 November 2025	12-Nov-25	PT. TRITUNGGAL LINTAS SAMUDRA (skala menengah)	Jl. Dermaga Ujung 2 No.2 Room 5 RT.001 RW.022 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara	1. Cephalopoda Beku 2. Udang Beku 3. Ikan Pelagis Beku 4. Ikan Bandeng Beku 5. Ikan Demersal Beku 6. Daging Kerang Beku	Perpanjangan
7	Tanpa inspeksi	12-Nov-25	PT. KIU KIU FISHERY (skala menengah)	Jl. Tuna II Blok K 7 B Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Cephalopod Beku	Perpanjangan
8	14 November 2025	17 November 2025	DAPOERCHESYA (skala mikro)	Perum Mustika Wanarisari Blok A6 No.39 Kel. Wanarisari, Kec. Cilitung, Kabupaten Bekasi	1. Pempek Kriuk 2. Pempek Ikan	Perpanjangan

9	14 November 2025	17 November 2025	PT. ASIA PANGAN SENTOSA (skala besar)	Jl. Bandengan Utara Kav. 81 Blok B No.10-12 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara	1. Ikan Pelagis Segar 2. Ikan Pelagis Beku 3. Ikan Demersal Segar 4. Udang Beku 5. Udang Segar 6. Kerang Segar 7. Kepiting Segar 8. Kerang Beku 9. Telur Bulu Babi Segar	Baru
10	18 November 2025	18 November 2025	PT. GABUNGAN SAMUDERA INTERNASIONAL (skala besar)	Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Pendaratan Ikan No.05 RT 005 RW 003 Kel. Muara Angke, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara	1. Salmon Segar, Trout Segar 2. Ikan Air Tawar Beku	Perpanjangan Baru
11	18 November 2025	21 November 2025	PT. BERRAH TUNA SAMUDERA (skala menengah)	Jl. Tuna 6, Rusing prases No. 10 Dermaga Barat Pelabuhan Muara Baru Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara	1. Tuna Beku 2. Ikan Pelagis Beku 3. Daging Tuna Beku 4. Cephalopoda Beku 5. Salmon Beku 6. Ikan Demersal Beku	Perpanjangan
12	19 November 2025	20 November 2025	PT. CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK (skala besar)	Jl. Muara Baru Ujung Blok K No. 7D Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Ikan Bandeng Beku	Baru

13	19 November 2025	21 November 2025	CV. MINA NUSANTARA (skala menengah)	Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nitam Zachman, Jl. Pantai Raya Blok 5 No.4-5 RT 20 RW 17 (Room 4) Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara	1. Ikan Pelagis Beku 2. Cephalopoda Beku 3. Ikan Demersal Beku 4. Salmon Beku, Trout Beku 5. Daging Tetelan Tuna Beku	Perpanjangan
14	19 November 2025	26 November 2025	PT. TOBA MINA SEJAHTERA (skala menengah)	Komplek Perkantoran dan Pergudangan Muara Baru Blok B 1-7 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	1. Cephalopoda Beku 2. Daging Tetelan Tuna Beku 3. Salmon Beku, Trout Beku 4. Ikan Demersal Beku 5. Ikan Pelagis Beku	Baru
15	Tidak Inspeksi	18 November 2025	MW BAKERY AND CAKE (skala mikro)	Perum Bumi Sindang Asri Blok B3/15.002/010 Kel. Sindangmulya, Kec. Cibarusah, Kabupaten Bekasi	1. Roti Ikan 2. Pastel Abon Ikan 3. Nila Krispi 4. Otak-otak Ikan	Perpanjangan

No.	Tanggal Inspeksi	Tanggal Sertifikat	Nama (IP/UPR)	Alamat	Nama Inspektor Mutu	Jenis Produk	Status
1	1 Desember 2025	1 Desember 2025	PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA (skala menengah)	Jl. Dermaga Ujung 2 No. 2 Room # KI 002 RW 022 Kel. Penjaringan, Kec. Pluit, Kota Jakarta Utara	1. Dede Suhendra (ketua) 2. Olmos Adi Witbowo	1. Cephalopoda Beluk 2. Udang Beluk 3. Ikan Bandeng Beluk 4. Ikan Pelagis Beluk 5. Daging Kerang Beluk 6. Ikan Demersal Beluk	Perpanjangan
2	3 Desember 2025	3 Desember 2025	PT. SEGARA LINTAS TERPADU (skala mikro)	Jalan Dermaga 1 No.4, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara - DKI Jakarta Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Nugroho Andi Cahyono (ketua) 2. Phillips Pria Pranata	1. Ikan Pelagis Beluk 2. Salmon Beluk	
3	1 Desember 2025	1 Desember 2025	PT. SANJAYA CIPITA LESTARI (skala besar)	Kawasan Industri Jababeka III, Jl. Teknologi Raya Blok A - Sa Kel. Pondok Gombong, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	1. Dedi Supardi (ketua) 2. Dah Ayu Kumalasari	1. Ikan Demersal Beluk 2. Cephalopoda Beluk 3. Daging Kerang Beluk 4. Salmon Beluk, Trout Beluk 5. Ikan Pelagis Beluk	Baru
4	3 Desember 2025	5 Desember 2025	PT. SINAR LALUTAN TERPADU (skala besar)	Jl. Dermaga Muara Angke No. 17 - 20 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara	1. Nugroho Andi Cahyono (ketua) 2. Fishenger V.D. Suhaya	1. Telur Ikan Beluk 2. Sirip Ikan Beluk 3. Telur Ikan Terbang Beluk 4. Ikan Asin Kering 5. Kapiting Beluk	Perpanjangan
5	4 Desember 2025	5 Desember 2025	PT. MITRA TIMUR RAYATAMA (skala kecil)	Jl. Dermaga No.1 Pelabuhan Penyeberangan Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	1. Olmos Adi Witbowo (ketua) 2. Phillips Pria Pranata	1. Ikan Pelagis Beluk 2. Ikan Demersal Beluk 3. Tuna Beluk 4. Cephalopoda Beluk	Perpanjangan
6	5 Desember 2025	8 Desember 2025	PT INDOBODA JAYA, MAKMUR (skala menengah)	Jl. Cim. Raya No.3 Muara Baru Grogong Kel. Penjaringan, Jakarta Utara	1. Phillips Pria Pranata (ketua) 2. Olmos Adi Witbowo	1. Ikan Demersal Beluk 2. Ikan Pelagis Beluk	Perpanjangan

7	9 Desember 2025	10 Desember 2025	(PT) AWINDO (skala menengah)	Jl. Areo Galangan Kapal, Kawasan PPS Nizam Zachman Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Fishenger Victor Dimug Suhaya (ketua) 2. Ridwan	1. Ikan Demersal Beluk 2. Cephalopoda Beluk	Perpanjangan
8	9 Desember 2025	10 Desember 2025	(PT) KITA MAU JAVA (skala menengah)	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Jl.Tuna Raya Blok C Muara Baru	1. Dah Ayu Kumalasari (ketua) 2. Phillips Pria Pranata	1. Tuna Beluk 2. Cephalopoda Beluk 3. Ikan Pelagis Beluk 4. Ikan Demersal Beluk	Baru
9	17 Desember 2025	18 Desember 2025	PT. KAJAR MANDIRI CITRAMINA (skala besar)	Jl. Cim. Raya No.3, Kawasan PPS Nizam Zachman Muara Baru Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta 14440	1. Fishenger V.D. Suhaya (ketua) 2. Dah Ayu Kumalasari	1. Tuna Loin Masak Beluk 2. Ikan Pelagis Beluk 3. Ikan Demersal Beluk	Perpanjangan

10.	18 Desember 2025	19 Desember 2025	PT. ICHEWA INDONESIA (skala besar)	Jl. Cempaka No. 12 RT.03 RW.02 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	1. Nugroho Andi Cahyono (Ketua) 2. Dimas Adi Wibowo	1. Fillet Ikan Segar 2. Fillet Ikan Beku 3. Ikan Demersal Segar 4. Ikan Demersal Beku 5. Ikan Pelagis Segar 6. Ikan Pelagis Beku 7. Cephalopoda Segar 8. Cephalopoda Beku 9. Telur Ikan Segar 10. Telur Ikan Beku 11. Kerang Segar 12. Udang Segar 13. Udang beku 14. Tuna Segar 15. Tuna Beku 16. Kepiting Segar 17. Kepiting Beku 18. Hati Ikan Segar 19. Hati Ikan Beku 20. Salmon Segar, Trout Segar 21. Salmon Beku, Trout Beku 22. Bulu Babu Segar 23. Bulu Babu Beku 24. Telur Bulu Babu Segar 25. Telur Bulu Babu	Perpanjangan Baru
11.	18 Desember 2025	22 Desember 2025	PT. CHARLY WILAYA TUNA (skala besar)	Jl. Muara Baru Utara, Pelabuhan Muara Baru Blok K/C Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara	1. Esti Ranayu (Ketua) 2. Philipus Pria Pranata	1. Tuna Utuh Beku 2. Cephalopoda Beku 3. Ikan Demersal Beku 4. Ikan Pelagis Beku 5. Hiu Beku	Perpanjangan

12.	Tidak Inspeksi	19 Desember 2025	SLE (skala mikro)	Craha Permai Sukadani Blok B 06/17 Kel. Sukadani, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	Tidak Inspeksi	1. Teri Goreng Kering 2. Kerupuk Tulang Kari 3. Abon Lele 4. Nugget Ikan	Perpanjangan
13.	Tidak Inspeksi	23 Desember 2025	Ainar Food (skala mikro)	Jl. Muara Baru Tambok Bolong RT.001/RW.17, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara	Tidak Inspeksi	Kripik Kulit Ikan	Perpanjangan
14.	23 Desember 2025	24 Desember 2025	CV. INDO PACIFIC (skala besar)	Kawasan Perbaungan Perikanan Sumedang Nirim Zichman R. Tuna II No. 3 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara	1. Dimas Adi Wibowo 2. NI Luh Putu Ari Susanti	1. Udang Beku 2. Ikan Air Tawar Beku	Perpanjangan
15.	24 Desember 2025	24 Desember 2025	[PT] ARROHMAR SECARA INDONESIA (skala mikro)	Jl. Dermaga Muara Angke No. 98 Roon 1 Kel. Muara Angke, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara	1. Nugroho Andi Cahyono 2. Diah Ayu	1. Ikan Pelagis Beku 2. Ikan Demersal Beku 3. Cephalopoda Beku 4. Ikan Bandeng Beku 5. Udang Beku 6. Daging Kerang Beku 7. Salmon Beku	Perpanjangan Baru
16.	Tidak Inspeksi	25 Desember 2025	DAPUKMANIZ (skala mikro)	Jl. Gatot Subroto Gg. 1K No. 56 Kel. Karangasih, Kec. Okorang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	Tidak Inspeksi	1. Pempek Ikan	Perpanjangan
17.	Tidak Inspeksi	25 Desember 2025	MW Bakery and Cake (skala mikro)	Perum Bumi Sindang Asri Blok B3/15 002/02D Kel. Sindangmulya, Kec. Cibarusah, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	Tidak Inspeksi	1. Kripik Ikan	Baru

18	30 Desember 2025	30 Desember 2025	PT. AVANNA PUTRI PRATAMA (skala menengah)	Jl. Sunter Kenyayon No.126 KT 010 RW 009 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Prak, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Rina Antoiningsari (Ketua) 2. Nugroho Andi Cahyono	1. Tuna Beku 2. Kepiting Beku 3. Cumi-Cumi Beku 4. Cumi-Cumi Segar 5. Kepiting Segar 6. Udang Segar 7. Udang Beku 8. Lobster Beku 9. Lobster Segar 10. Sotek Beku 11. Sotek Segar 12. Kerang Beku 13. Kerang Segar 14. Ikan Pelagis Segar 15. Ikan Pelagis Beku 16. Ikan Demersal Segar 17. Ikan Demersal Beku 18. Telur Ikan Beku 19. Telur Ikan Segar 20. Salmon Segar, Trout Segar 21. Ikan Kering Beku 22. Salmon Beku, Trout Beku 23. Fillet Salmon Beku 24. Fillet Salmon Segar 25. Bulu Bulu Segar 26. Bulu Bulu Beku	Perpanjangan
----	------------------	------------------	--	--	---	---	--------------



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II  
JALAN SWASEMADA TIMUR XIII NO. 64, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14320  
TELEPON (021) 43803634, 4371804, FAKSIMILE (021) 43803634  
LAMAN [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id) SUREL [bkpm@bkpm.go.id](mailto:bkpm@bkpm.go.id)

SURAT PENGANTAR  
NOMOR B.40/BKPM.JKT II/TU.2101/2026

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	IKU 2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV Tahun 2025	1 (satu) berkas	Disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 9 Januari 2026  
Penanggung Jawab Laporan  
  
Dede Suhendra, S.Pi., M.Si

**PERHITUNGAN UNTUK PERSENTASE (%)  
JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
di WILAYAH KOTA JAKARTA UTARA  
SEMESTER I TAHUN 2025**

---

**A. Penilaian sarana dan prasarana**

Perhitungan bobot penilaian sarana prasarana dengan rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria	Nilai	Kriteria ditemukan
Sangat Baik	100	-
Baik	75	3
Cukup	50	-
Kurang	30	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	

Maka perhitungan yang dilakukan adalah penjumlahan dari kriteria baik sekali, kriteria baik, kriteria cukup dan kriteria buruk

$$\frac{3 \times 75}{3} = 75$$

**B. Penilaian pengujian produk**

Penilaian bobot pengujian produk dilakukan berdasarkan nilai/skor parameter hasil uji yang terdiri dari minimum 5 parameter yakni organoleptik, bakteri ALT, E. coli, bakteri Salmonella dan Formalin. Kriteria dari 5 parameter tersebut sebagai berikut :

$$\text{Rata-rata} = \text{rata-rata} = 1/n \sum_{i=1}^n (i - 1)^n \equiv /Y_i (i) /$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey ditemukan nilai organoleptik dari produk. Maka rata-rata didapatkan dengan :

$$(7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7) / 9 = 7 \times 10 = 70$$

Perhitungan kriteria ALT, bakteri E.coli, Formalin dan Salmonella rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria ALT	Kriteria ditemukan	Kriteria E.coli	Kriteria ditemukan	Kriteria Salmonella	Kriteria ditemukan	Kriteria Formalin	Kriteria ditemukan	Nilai/skor
$\geq 5 \times 10^5$	0	$> 3$	0	Positif	0	Positif	0	0
$< 5 \times 10^5$	9	$< 3$	9	Negatif	9	Negatif	9	100

Perhitungan ALT dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria  $>5 \times 10^2$  dan  $<5 \times 10^2$

$$\frac{0 \times 10}{9} + \frac{9 \times 100}{9} = 100,00$$

Perhitungan bakteri E.coli dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria  $>3$  dan  $<3$

$$\frac{0 \times 10}{9} + \frac{9 \times 100}{9} = 100,00$$

Perhitungan bakteri Salmonella dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{9} + \frac{9 \times 100}{9} = 100,00$$

Perhitungan Formalin dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{9} + \frac{9 \times 100}{9} = 100,00$$

Penilaian rata-rata dari pengujian produk dideapatkan dengan rumus rata-rata

$$\text{rata-rata} = \text{rata-rata} = 1/n \sum_{i=1}^n Y_i$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Batasan dilakukan survey dideapatkan

1. Nilai organoleptik dari produk = 70
2. Nilai kriteria bakteri ALT = 100
3. Nilai kriteria bakteri E.coli = 100
4. Nilai kriteria bakteri Salmonella = 100
5. Nilai kriteria Formalin = 100

Maka rata-rata nilai pengujian produk dideapatkan dengan

$$\frac{70 + 100 + 100 + 100 + 100}{5} = 94$$

C. Penilaian jaminan mutu

$$\text{Jaminan mutu} = (60\% \times \text{nilai sarana prasarana}) + (40\% \times \text{nilai pengujian produk})$$

Batasan dilakukan survey dideapatkan

1. Nilai sarana prasarana = 76,00
2. Nilai pengujian produk = 84,00

$$(60\% \times 76,00) + (40\% \times 84,00) = 45,00 + 37,60 = 82,60\%$$

Becara sederhana dapat dinyatakan jaminan mutu keamanan produk perikanan di Kota Jakarta Utara pada semester I tahun 2025 82,60 % dalam kriteria yang memenuhi persyaratan, sedangkan 17,40% dalam kriteria yang belum memenuhi persyaratan.

Diperiksa oleh : Aprilia Awella, S.Tr. Pl

Tanggal : 2 Juni 2025

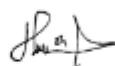
Tanda Tangan:



Disediujul oleh : Hendri, S.Pi, M.Bi

Tanggal : 3 Juni 2025

Tanda Tangan :





RESUME GIAT KEGIATAN

PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI INPRES 01 TAHUN 2017	
Nama Kegiatan	Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Negeri di Kota/Kab Jakarta Utara- Provinsi DKI Jakarta
Naras Kegiatan	<p>Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).</p> <p>Sehingga menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan No.45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat;</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan pada sentra-sentra penyedia pangan sehat di pasar modern dan pasar tradisional di Kota/Kab Jakarta Utara – Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Lokasi kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasar Tradisional :<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pasar Koja Baru, dengan sampel :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Udang Vannamei</li><li>b. Kembung</li><li>c. Kakap</li></ol></li><li>2) Pasar Sunter Podomoro, dengan sampel :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Udang Vannamei</li><li>b. Kembung</li><li>c. Bandeng</li></ol></li></ol></li><li>2. Pasar Modern :<ol style="list-style-type: none"><li>1) Lottemart Kelapa Gading, dengan sampel :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Udang Vannamei</li><li>b. Baronang</li><li>c. Kembung</li></ol></li></ol></li></ol>



KEMENTERIAN  
KELUARAHAN DAN  
PERIKANAN



Unit Kerja yang Terlibat	1. Balai KIPM Jakarta II 2. BUPSPM BPPMHKP 3. Dinas KKP Provinsi DKI Jakarta 4. Suku Dinas KKP Kota Jakarta Utara 5. Lottemart Kelapa Gading 6. PO Pasar Koja Baru 7. PO Pasar Sunter Podomoro
Petugas	1. Dede Suhendra, S.Pi, M.Si 2. Dedi Supardi, S.St.Pi 3. Nindya Hamber Wasisto, S.Pi, M.Si 4. Maryam Ulfa Latuconsina, S.Kel, M.Si 5. Nugroho Ardi Cahyono, S.St.Pi, M.Eng 6. Esti Rahayu, A.Md, S.Bi 7. Diah Ayu Kumalasari, A.Md 8. Ridwan, A.Md 9. Ir. Raymond Agustinus Pelupessy, M.Si 10. Ni Luh Putu Ari Susanti, A.Md.Pi 11. Fishenger Victor Diniug Blahaya, S.St.Pi 12. Dlmss Adi Wibowo, A.Md 13. Riana Azlan Ningarsi, A.Md, S. Bi 14. Sumayani, S.Pi, M.Tr.Pi 15. Philipus Pria Pranata, A.Md 16. Meyka Ekaristi Buci, A.Md
Waktu Pelaksanaan	13 Maret 2025 Pukul : 07.00 – 15.00 WIB
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	Surat Tugas Nomor : B.307/BKIPM.JKT.II/KP.440/III/2025, tanggal 11 Maret 2025



KEMENTERIAN  
KELUARAHAN DAN  
PERIKANAN



#### DOKUMENTASI KEGIATAN

##### A. PASAR KOJA BARU



B. PASAR SUNTER PODOMORD





LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
Nama IKU 4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Jakarta II (%)							

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	Q1	Q2	8m.I	Q3	Q4	8m.II	Tahunan		
Target	99	99	99	99	99	99	99		99
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

Catatan :

- Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4  
Bm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2  
Bm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4  
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang dieksport ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).
- Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang dieksport telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.
- Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemenan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Capatan Indikator Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan Ingkup Bulet KIPM Jakarta II triwulan IV sudah terealisasi, dengan persentase adalah 100% tidak ada penolakan jumlah HC oleh negara tujuan.

Jumlah HC yang diterbitkan pada triwulan IV adalah sebanyak 3413 Sertifikat, pada bulan Oktober sebanyak 1225, bulan November sebanyak 1102 dan Desember sebanyak 1082 sertifikat dan tidak ada penolakan.

a. Capatan iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$X = \frac{A - B}{A}$$

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan sifat (%) A = HC yang diterbitkan oleh BPPM/KKP B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

(Nonifikasi Penolakan karang/penolakan HC mutu dilengkapi)

**Akar Masalah**

–

**Tindakan yang telah dilaksanakan**

–

Rekomendasi/rancangan aksi	Penanggung Jawab	Periode
--	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan pengawasan Mutu dan keamanan Hasil Penjualan	Tw.4 Tahun 2025

**LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**  
**RASIO EKSPOR IKAN DAN HASIL PERIKANAN YANG DITERIMA OLEH NEGARA TUJUAN EKSPOR**  
**LINGKUP BALAI KIPM JAKARTA II**

Nama Unit Kerja : Balai KIPM Jakarta II  
 Periode Laporan : Triwulan IV

Uraian Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023			
	Tahunan	TW I	TW II	TW III
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	99	100	100	100

**Uraian Capaian Indikator :**

Capaian Indikator Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV sebesar 100% dengan merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang dieksport ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Rincian jumlah HC ekspor serta perhitungan capaian IKC sebagai berikut :

Bulan	Jumlah HC yang diterbitkan	Jumlah HC yang ditolak negara tujuan	Percentase
Oktober	1229	0	100%
November	1102	0	100%
Desember	1082	0	100%
Total	3413	0	100%

$$x \frac{A - B}{A} \qquad x \frac{3413 - 0}{3413}$$

A = HC Ekspor yang diterbitkan

B= Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Sumber data : SiasMutu

Penanggung Jawab Kegiatan  
  
 Dedi Kurniandra, S.Pt., M.Si



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II  
JALAN SWASEMADYA TIMUR XII NO. 64, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14320  
TELEPON (021) 43803634, 4371604, FAKSIMILE (021) 43803634  
LAMAN [www.bkpm.jkt.go.id](http://bkpm.jkt.go.id) SUREK [bkpm.jkt.go.id](http://bkpm.jkt.go.id)

SURAT-PENGANTAR  
NOMOR B.38/BKIPM.JKT.II/TU.210/I/2026

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	IKU.4 Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV Tahun 2025	1 (satu) berkas	Disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 9 Januari 2026  
Penanggung Jawab Laporan  
Dede Suhendra, S.Pi., M.Si

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**

**NOTA DINAS  
NOMOR 111/SJ.2/RC.610/I/2026**

**Yth.** : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal  
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal  
3. Para Pit. Sekretaris Badan  
4. Kepala Biro Perencanaan  
5. Kepala Biro Umum  
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan  
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

**Dari** : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

**Lampiran** : Satu berkas

**Hal** : Penyampaikan Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025

**Tanggal** : 10 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 3953/SJ.1/RC.610/XII/2025 hal Penyampaikan Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester II tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 11.30 WIB.
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester II tahun 2025 sebesar 90,31 dari target nilai 92.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester II tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara Smart, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, dan Sinergi (SAILS).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Sutrisno Subagyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Inspektur Jenderal



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

126	047	032	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	87.54	100.00	50.00	100.00	77.19	100.00	90.85	100%	0.00	90.85
127	016	032	649622	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.13	20.00	5.00	10.00	7.72	25.00				
					Nilai Aspek	93.77			81.80			100.00				
					Nilai	100.00	73.17	100.00	50.00	100.00	94.79	100.00				
128	020	032	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	Bobot	10	15	20	10	10	10	25	90.45	100%	0.00	90.45
					Nilai Akhir	10.00	12.22	19.63	5.00	10.00	9.43	25.00				
					Nilai Aspek	90.73			85.61			100.00				
					Nilai	100.00	81.45	98.15	50.00	100.00	94.29	100.00				
129	008	032	099325	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Bobot	10	15	20	10	10	10	25	63.18	70%	0.00	90.26
					Nilai Akhir	10.00	8.18	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.28			100.00			100.00				
					Nilai	100.00	54.55	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00				
130	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Bobot	10	15	20	10	10	10	25	90.23	100%	0.00	90.23
					Nilai Akhir	10.00	9.40	16.51	10.00	10.00	9.32	25.00				
					Nilai Aspek	81.32			93.94			100.00				
					Nilai	100.00	62.64	82.57	100.00	100.00	93.17	100.00				
131	175	032	649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	Bobot	10	15	20	10	10	10	25	90.08	100%	0.00	90.08
					Nilai Akhir	10.00	11.89	20.00	5.00	10.00	8.19	25.00				
					Nilai Aspek	89.63			82.97			100.00				

hal : 22 dari 30 halaman

Tanggal cetak : 10-01-28 04:40:01 dih : KL032

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS  
NOMOR 138/SJ.2/RC.610/I/2026

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan  
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal  
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal  
4. Para Sekretaris Badan  
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan  
Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN  
Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)  
Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025  
Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan dengan itu kami sampaikan capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian seluruh Unit Eselon I sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,5 dan Capaian seluruh Satuan Kerja (Satker) sudah mencapai target sebesar 71,5 sebagaimana data terlampir.
2. Capaian IK NKPA level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IK NKPA Tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP (terlampir).
3. Capaian IK NKPA level 0 (KKP) masih dalam proses koordinasi perbaikan sistem aplikasi Monev Kemenkeu sehubungan tidak dapat dilakukan penginputan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada aplikasi SAKTI dengan keterangan error.
4. Penyempalan capaian IK NKPA level 0 (KKP) paling lambat kami sampaikan tanggal 15 Januari 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

 Ditandatangani  
Seutra Subagyo

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NIKPA) TA. 2025  
LINGKUP BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KKP  
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
INSPEKTORAT JENDERAL**

---

NOTA DINAS  
NOMOR 82/ITJ/RC.610/X/2025

Yth. : 1. Sekretaris Jenderal KKP  
2. Para Dirjen lingkup KKP  
3. Para Kepala Badan lingkup KKP

Dari : Inspektur Jenderal

Lampiran : Satu Halaman

Hal : Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP

Tanggal : 07 Oktober 2025

---

Bersama ini disampaikan capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan" lingkup KKP sebagai berikut :

1. Realisasi capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2024.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" sebesar 0,074%, realisasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan  $\leq 0,5\%$ . Adapun rincian capaian dari masing-masing Eselon I lingkup KKP disampaikan pada lampiran I.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ade Tajudin Sutiauwarman

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
  2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
-

Lampiran  
 Nomor : 82/ITJ/RC.610/X/2025  
 Tanggal : 07 Oktober 2025

**Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK  
 atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
a	b	C	d	E
1	Setjen	1.885.275.241,00	822.863.865.685,00	0,229
2	Ditjen PKRL	357.650.852,00	471.154.781.232,00	0,076
3	Ditjen PT	35.794.407,00	880.627.463.236,00	0,004
4	Ditjen PSDKP	50.381.000,00	995.498.070.995,00	0,005
5	Ditjen PB	368.007.712,00	992.008.206.671,00	0,037
6	BPPSDMKP	792.998.330,00	1.423.646.688.907,00	0,056
7	Ditjen PDSPKP	1.160.724.332,00	324.896.904.773,00	0,357
8	BPPMHKP	-	324.873.963.088,00	-
9	Itjen	-	84.427.641.894,00	-
	<b>TOTAL</b>	<b>4.650.831.874,00</b>	<b>6.299.997.586.481,00</b>	<b>0,074</b>



Ditandatangani  
 Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Bacaan Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, inovatif dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nama IKU 1 : Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Indeks).

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	8m.I	Q3	Q4	8m.II	Tahunan		
Target	-	82	82	-	82	82	82	82	82
Realisasi	-	84,80	84,80	-	83,22	83,22	84,01	-	-
% Capaian	-	103,41	103,41	-	101,48	101,48	102,45	-	-

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, 2, 3 dan 4.

Sm. I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm. II = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025.

**Isu utama dan implikasi**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesiannya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

**Cara Pengukuran:**

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i \\ = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} + R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} + R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} + R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} + R_{4m}$$

Keterangan:

IP : Indeks Profesionalisme

IP<sub>1</sub> : Indeks Profesionalisme ke-i

IP<sub>2</sub> : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP<sub>3</sub> : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP<sub>4</sub> : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP<sub>4</sub> : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} + R_{1j}$  : Bobot Indikator Kualifikasi ke-j Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} + R_{2k}$  : Bobot indikator Kualifikasi ke-k Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} + R_{3l}$  : Bobot indikator Kualifikasi ke-1 Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-1

$W_{4m} + R_{4m}$  : Bobot indikator Kualifikasi ke-m\* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Akar Masalah

Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi/rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan pelatihan profesi untuk Kualitas para anggota ASN.	Ketua Tim Dukungan Manajemen Teknis	TW. 4 tahun 2025

IP ASN Semester II Belai KIPM Jakarta II											
	Rank	Member	Code	Page	FAQ	17 AUG 2024					
3	3	ALIYAH SITI HUSSAINAH	21	203	90.0%	3189	65.0%	25	8102%	0	100%
4	4	PROFESSOR DR. DEWI SRI	28	216	90.0%	3487	86.0%	25	8103%	0	100%
5	5	RAUL DEWI HANIFAH SRI SRI	18	332	80.0%	3177	76.0%	28	8104%	0	100%
6	6	RAUL DEWI HANIFAH SRI SRI	37	332	80.0%	38	83.0%	25	8105%	0	100%
7	7	RAUL DEWI HANIFAH SRI SRI	20	315	94.0%	3805	70.0%	25	8106%	0	100%
8	8	RAUL DEWI HANIFAH SRI SRI	48	332	90.0%	3154	80.0%	25	8107%	0	100%
9	9	RAUL DEWI HANIFAH SRI SRI	29	317	82.0%	35	80.0%	25	8108%	0	100%
10	10	RAUL DEWI HANIFAH SRI SRI	16	216	80.0%	3447	88.0%	26	8109%	0	100%
11	11	RAUL DEWI HANIFAH SRI SRI	15	332	80.0%	31	77.0%	26	8110%	0	100%
12	12	RAUL DEWI HANIFAH SRI SRI	19	316	84.0%	31	77.0%	25	8111%	0	100%
13	13	RAUL DEWI HANIFAH SRI SRI	41	335	82.0%	3454	80.0%	25	8112%	0	100%
14	14	RAUL DEWI HANIFAH SRI SRI	13	317	80.0%	3380	87.0%	25	8113%	0	100%
15	15	RAUL DEWI HANIFAH SRI SRI	14	333	90.0%	2876	70.0%	25	8114%	0	100%
	1		2	3	4	5					



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [sef\\_bppmhkp@kkp.go.id](mailto:sef_bppmhkp@kkp.go.id)

---

Nomor : 1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 02 Januari 2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP

Yth.

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP;
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, BPPMHKP;
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen, BPPMHKP;
4. Kepala UPT lingkup BPPMHKP.

di  
tempat

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta memperhatikan Surat Deputi RB Kunwas Nomor B/641/AA.05/2024 Tanggal 19 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Poin 10 yang menyebutkan untuk mendorong peningkatan evaluasi AKIP internal unit organisasi Level II serta Surat Sekretaris BPPMHKP B.5339 / BPPMHKP.1/RC.610 /XI/2025 tanggal 18 November 2025 tentang Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/3K8mezW>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.
2. Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Tahun 2025 sebesar **Nilai 86**, Sebanyak 49 UPT (96,07%) telah memenuhi target kinerja dan sisanya 2 UPT (3,93%) belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP adalah sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	SKIPM MATARAM	27,6	27,6	13,8	22,5	86	A
2	SEKRETARISLT	27	27	13,5	22,5	86	A
3	BPPMHKP	27	27	13,5	22,5	86	A
4	SKIPM MAKASSAR	27	27	13,05	22,5	86,05	A
5	SKIPM BANDUNG	27	27	13,5	21,05	86,35	A
6	SKIPM JCH	27,6	27	13,15	22	86,15	A
7	PUGAT MANAJEMEN MUTU	27	27	13,6	22,5	86,1	A
8	SKIPM LUWUK BANGGAI	26,1	27	13,5	22,5	86,1	A
9	SUS-PM	27,6	25,3	13,5	22,5	86,0	A
10	SKIPM MEDAN I	27	27	13,15	22,5	86,05	A
11	SKIPM PALINGKARAYA	27	27	13,6	22	86,6	A
12	SKIPM TARAKAN	27	25,8	13,5	22,5	86,5	A
13	PUGAT MUTU PRIMER	27	27	13,5	21	86,5	A
14	PUGAT MUTU PAGDA PANEN	27	27	13,5	21	86,5	A
15	SKIPM BANJARMASIN	27	25,5	13,5	22,5	86,5	A
16	SKIPM CIREBON	26,1	27	13,6	22,5	86,3	A
17	SKIPM PALEMBANG	27	25,5	13,05	22,5	86,05	A
18	SKIPM PONTIANAK	27	27	13,75	21,05	86	A
19	SKIPM PEKANBARU	27	27	13,5	22,5	86	A
20	SKIPM PALU	27	27	11,6	22,5	87,9	A
21	SKIPM SURABAYA II	27	27	12,6	21,05	87,85	A
22	SKIPM MEDAN II	27	24,6	11,65	22,5	87,75	A
23	SKIPM PADANG	27	22,5	12,6	22,5	87,6	A
24	SKIPM ENTIKONG	27	25,2	13,6	21,05	87,65	A
25	SKIPM BILBOKAPIN	27	27	13,6	22	87,5	A
26	SKIPM GORONTALO	27,6	24,6	12,6	22,5	87,5	A
27	SKIPM TAHUNA	26,1	27	11,7	22,5	87,3	A
28	SKIPM JAMBI	27	25,3	13,5	21,05	87,25	A
29	SKIPM SORONG	25,5	26,1	13,05	22,5	87,15	A
30	SKIPM KUPANG	27	27	11,85	21,05	87,1	A
31	SKIPM PANGKAL PINANG	27	27	11,85	21,05	87,1	A
32	SKIPM MANADO	27	24	13,5	22,5	87	A
33	SKIPM SEMARANG	27	24	13,5	22,5	87	A
34	SKIPM YOGYAKARTA	27	24	13,5	22,5	87	A
35	SKIPM JAKARTA I	27	27	13,6	22	86,9	A
36	SKIPM KENDARI	27	27	10,55	22,5	86,95	A
37	SKIPM TERNATE	27	27	13,5	22,5	86,9	A
38	SKIPM BENGKULU	27	25,5	13,05	21,05	86,8	A
39	SKIPM TJ. BALI	25,2	27	11,85	22,5	86,25	A
40	SKIPM BIMA	25,5	25,5	13,05	22,5	86,25	A
41	SKIPM SURABAYA I	26,1	26,1	13,05	21,05	86,5	A
42	SKIPM MERAKUKE	25,5	27	13,75	21,05	86,5	A
43	SKIPM LAMPUNG	27	25,2	13,5	20,75	86,45	A
44	SKIPM BKT	27	25,5	13,6	21	86,4	A
45	SKIPM JAKARTA II	27	27	11,95	21	86,35	A
46	SKIPM MERAK	25,5	25,5	13,75	22,5	86,35	A
47	SKIPM MAMUJU	25,5	25,5	13,75	22,5	86,35	A
48	SKIPM BAU-BAU	26,1	27	11,85	21,05	86,2	A
49	SKIPM TANJUNG PINANG	24,9	27	12,75	21,5	86,15	A
50	SKIPM DENPASAR	27	24	12,6	21	86,0	A
51	SKIPM JAYAPURA	20,7	20,7	12	18,8	86,8	B

- Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP untuk Satker lingkup yang telah mencapai target ( $\geq 86$  Nilai) yang telah ditetapkan pada tahun 2025.
- Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP, khususnya untuk 20 Satker dengan dibawah target ( $< 86$  Nilai) diminta untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dan saran pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target Indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP periode Tahun 2026;
- Rincian detail Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP UPT lingkup BPPMKHP Tahun 2025 dapat dilihat pada aplikasi Kinerjaku masing-masing satker.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n Kepala BPPMHKP  
Pit. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.



Diambil/tangani Secara Eletronik

Woro Nur Endang Sarlati

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**Nama Basaran Strategic** : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, innoasi dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kesehatan dan Perikanan

**Nama IKU 11** : Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Balai KIPM Jakarta II (Indeks).

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	8m.I	Q3	Q4	8m.II	Tahunan		
Target	-	-	-	-	88	88	88	88	88
Realisasi	-	-	-	-	88,25	88,25	88,25	-	-
% Capaian	-	-	-	-	100,29	100,29	100,29	-	-

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, 2, 3 dan 4.

Sm. I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm. II = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025.

**Isu utama dan implikasi**

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja

**Cara Pengukuran:**

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:

Kategori	Nilai	Prediksi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50 - 60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Akar Masalah
--------------

Tindakan yang telah dilaksanakan
----------------------------------

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
	Ketua Tim Dukungan Manajemen Teknis	TW. 4 tahun 2025

Lampiran



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LAKAO), FAKSIMILE (021) 3519282  
LAMAN [www.bappomhkp.go.id](http://www.bappomhkp.go.id) SUREL [sekolah@bappomhkp.go.id](mailto:sekolah@bappomhkp.go.id)

Nomor : 1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 02 Januari 2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP

Yth.

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP;
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, BPPMHKP;
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen, BPPMHKP;
4. Kepala UPT Lingkup BPPMHKP.

di

tempat

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta memperhatikan Surat Deputi RD Kunwas Nomor B/641/AA.05/2024 Tanggal 19 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Poin 10 yang menyebutkan untuk mendorong peringkat evaluasi AKIP internal unit organisasi Level II serta Surat Sekretaris BPPMHKP B.5339 / BPPMHKP.1/RC.610 /XII/2025 tanggal 18 November 2025 tentang Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/3K8me2W>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang di evaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.
2. Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Tahun 2025 sebesar **Nilai 86**, Sebanyak 49 UPT (96,07%) telah memenuhi target kinerja dan sisanya 2 UPT (3,93%) belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP adalah sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAJARAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	SEKRETARIAAT REPUBLIK	22.6	22.6	15.3	22.5	86	AA
2	SKPM MANGKASSAR	27	27	15.5	22.5	80	A
3	SKPM BAJUHARIS	27	27	15.5	22.5	80	A
4	SKPM BAJUHARIS	27	27	15.05	22.5	86.5	A
5	SKPM ACEH	27.6	27	15.5	21.25	86.25	A
6	SKPM JABAR	27	27	12.15	22.5	86.25	A
7	PUSAT KINERJA KINERJA	27	27	12.8	22.5	89.1	A
8	SKPM LUMAJANG BAKOKU	20.1	27	15.5	22.5	89.1	A
9	SKPM PPI	22.6	25.2	15.5	22.5	86.5	A
10	SKPM MEDAN	27	27	12.15	22.5	86.25	A
11	SKPM PANGKARAYA	27	27	12.6	22	86.6	A
12	SKPM TARAKAN	27	27	15.5	22.5	86.5	A
13	PUSAT MULIA PROJEK PELERIN	27	27	15.5	21	86.5	A
14	PUSAT KINERJA PPIK-PI	27	27	15.5	21	86.5	A
15	SKPM BULUARASIH	27	25.5	15.5	22.5	86.5	A
16	SKPM CIREBES	20.1	27	12.8	22.5	86.2	A
17	SKPM PALU-MBANG	27	25.5	12.05	22.5	86.05	A
18	SKPM PONTALAK	27	27	12.75	21.25	86	A
19	SKPM POKAR BAHU	27	27	15.5	20.5	88	A
20	SKPM PALU	27	27	11.4	22.5	87.6	A
21	SKPM PAMAHAYA III	27	27	12.6	21.25	87.86	A
22	SKPM PAMAHAYA	27	25.5	12.85	22.5	87.75	A
23	SKPM PADANG	27	25.5	12.5	22.5	87.5	A
24	SKPM PELAIHARI	27	25.5	15.8	21.25	87.25	A
25	SKPM PALU PAPUA	27	27	15.5	20	87.5	A
26	SKPM POKER BATAK	22.6	24.6	12.8	22.5	87.3	A
27	SKPM TAHUFA	20.1	27	11.7	22.5	87.3	A
28	SKPM AMBON	27	25.5	15.5	21.25	87.25	A
29	SKPM RICHTER	25.5	26.1	13.05	22.5	87.5	A
30	SKPM KUPANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
31	SKPM PAUAKKAI PAPUA	27	27	11.85	21.25	87.1	A
32	SKPM MANADO	27	24	15.5	22.5	87	A
33	SKPM SIRMAKING	27	24	15.5	22.5	87	A
34	SKPM YOGYAKARTA	27	24	15.5	22.5	87	A
35	SKPM JAKARTA I	27	27	12.8	20	86.8	A
36	SKPM K. TALAS	27	27	10.35	22.5	86.05	A
37	SKPM TERATE	27	27	12.3	20.5	86.5	A
38	SKPM B. KAKILU	27	25.5	13.05	21.25	86.5	A
39	SKPM T. BALAI BENGKULU	29.2	27	11.65	21.25	87.1	A
40	SKPM BINA	25.5	25.5	13.05	22.5	86.55	A
41	SKPM B. BANJAR BALI	20.1	27	13.05	21.25	86.5	A
42	SKPM MELAKA	29.5	27	12.75	21.25	86.5	A
43	SKPM ALJABAR	27	25.2	13.5	20.75	86.45	A
44	SKPM MELAKA	30	25.5	12.8	21	86.4	A
45	SKPM JAKARTA III	27	27	11.25	21	86.25	A
46	SKPM MELAKA	25.5	25.5	12.75	22.5	86.25	A
47	SKPM MAMLU	25.5	25.5	12.75	22.5	86.25	A
48	SKPM BAJUHARIS	20.1	27	11.65	21.25	86.2	A
49	SKPM TAHUFA PAPUA	24.9	27	12.75	21.5	86.15	A
50	SKPM DENPAPAR	27	24	12.8	21	86.6	A
51	SKPM JAYAPURA	20.7	25.7	12	16.5	86.9	B

Dokumen ini telah diolah dengan sistem elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Biro Sertifikat Elektronik (BSE) BKKBN Republik Indonesia

3. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP untuk Satker lingkup yang telah mencapai target (≥86 Nilai) yang telah ditetapkan pada tahun 2025.
4. Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP, khususnya untuk Satker dengan dibawah target (≤86 Nilai) diminta untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dan saran pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP periode Tahun 2026;
5. Rincian detail Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP UPT lingkup BPPMHKP Tahun 2025 dapat dilihat pada aplikasi Kinerjaku masing-masing satker.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n Kepala BPPMHKP  
Pt. Sekretaris Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan.



Woro Nur Endang Sariati

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Sertifikat Elektronik (SSE), Badan Siber dan Sandi Negara

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2025**

<b>Nama Sasaran Strategic</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Inovatif dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
<b>Nama IKU 13</b>	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada BIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Targ et Th. 2025
	Q1	Q2	8m.II	Q3	Q4	8m.II	Tahunan		
Target	75	75	75	75	75	75	75		75
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
% Capaian	131,37%	131,37%	131,37%	131,37%	131,37%	131,37%	131,37%	131,37%	-

**Catatan :**  
**Q1,Q2,Q3,Q4** = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4  
**8m I** = Capaian Q1 + Capaian Q2  
**8m 2** = Capaian Q3 + Capaian Q4  
**Tahunan** = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi	
<p>Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemakaian pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada BIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada Indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (BIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Batum Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.</p>	

Percentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP :

- A. Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP
- B. Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

a. Saat ini telah dilakukan komplensi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025. Bapak KIPM Jakarta II telah mencapai persentase 100,00%.

b. Capaian laku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

Percentase KUI PBJ yang diumumkan di SIRUP =  
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP x 100%  
Anggaran Pengadaan barang/jasa

#### Akar Masalah

#### Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
	Biro umum dan PBJ	Tw.4 Tahun 2025

Percentase rencana umum pengadaan PBJ yang dilumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV 2026

#### 4. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelauban dan Perikanan

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) SALAI KPKI Jakarta II TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama: Sistem Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Inovatif dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelaikan dan Penegakan

Nama IKU 14 : Perbaikan penerapan dokumen pembangunan zon integritas lingkup UPT dalam KPKI Jakarta II (%)

IKU	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Realisasi	-	-	-	-	75,14	75,14	75,14	-	-
% Capaian	-	-	-	-	107,34	107,34	107,34	-	-

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, 2, 3 dan 4.

Sm. I = Capaian Q3 + Capaian Q2

Sm. II = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian diakhir tahun 2025.

Isu utama dan implikasi:

Ponilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Echelon I di KPK dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mencakup pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KPK.

Cara Pengukuran:

Nilai Pembangunan Integritas Unit Echelon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem anti korupsi, yang meliputi :

- Pembangunan zon integritas (bobot 50%)
- Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- Penanganan pengeduan masyarakat dan WSS (bobot 15%)
- Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
- Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Score lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Echelon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Akar Masalah

Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Meningkatkan nilai pembangunan integritas	Kelua Tim Dukungan Manajemen Teknis	TW.4 tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR.16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 35132070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAN [www.bppm.go.id](http://www.bppm.go.id) SUREL [bppmhp@bpm.go.id](mailto:bppmhp@bpm.go.id)

---

Nomor : B.179/BPPMHKP.1/OT.710//2026 15 Januari 2026  
Sifat : Blsas  
Lampiran : 1 (satu) Dokumen  
Hal : Hasil Penilaian Pembangunan Zi Menuju WBK/WBBM Tahun 2025

Yth. Kepala UPT Lingkup Badan PPMHKP  
Di Tempat

Dalam rangka Pemenuhan Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup UPT BPPMHKP dan Buret kami yang sebelumnya telah kami kirim dengan Nomor B.2406/BPPMHKP.1/OT.730//2025 Tanggal 5 Mei 2025 kepada 5 (lima) UPT yang dilakukan pemantauan 2 Tahunan dan Persiapan Penilaian TPI dan TPN, Buret Nomor B.3025/BPPMHKP.1/OT.720//2025 Tanggal 7 Juli 2025 kepada 42 (empat puluh dua) UPT tentang Penilaian Mandiri Eselon I terkait Pembangunan Zone Integritas Menuju WBK dan WBBM dilengkungan Badan PPMHKP Tahun 2025, serta Buret kami Nomor B.5753/BPPMHKP.1/OT.710//2025 Tanggal 11 Desember 2025 kepada 47 (empat puluh tujuh) UPT tentang Pemenuhan Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Zone Integritas menuju WBK UPT BPPMHKP, Tim Penilaian Mandiri Eselon I Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan penilaian mandiri terhadap Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zone Integritas Menuju WBK/WBBM Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Tujuan Pemantauan dan Penilaian Pembangunan Pembangunan Zi Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 yaitu untuk:
  - a. Mengetahui perkembangan pembangunan Zi menuju WBK/WBBM diseluruh Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,
  - b. Sebagai tahapan proses keberlanjutan komitmen pembangunan Zi menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,
  - c. Memberikan rekomendasi perbaikan dokumen pemenuhan LKE pembangunan Zi menuju WBK/WBBM dan memastikan bahwa Indikator pembangunan Zone Integritas telah dilengkapi dengan bukti dukung memadai,
  - d. sebagai sumber data Capaian IKU Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT BPPMHKP.

2. Ruang Lingkup Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zi menuju WBK/WBBM meliputi :
- A. PENGUNGKIT (Pemenuhan dan Reform)
    - 1) Manajemen Perubahan
    - 2) Penataan Tataaksana
    - 3) Penataan Sistem Manajemen Bdm Aparatur
    - 4) Penguatan Akuntabilitas
    - 5) Penguatan Pengawasan
    - 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - B. HASIL
    - 1) Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel
    - 2) Pelayanan Publik Yang Prima
3. Penilaian Pembangunan Zi menuju WBK/WBBM terhadap 47 UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan:
- a. 37 UPT yang memiliki target IKU Pembangunan Zi menuju WBK/WBBM, sebanyak 5 UPT dengan Target 75% dan 32 UPT dengan Target 70%;
  - b. Dari 37 UPT yang memiliki target IKU pembangunan Integritas, 35 UPT telah memenuhi nilai target dan 2 UPT belum memenuhi nilai target yang disebabkan pengiriman data melebihi batas waktu yang ditentukan dan proses penilaian telah selesai;
  - c. Terdapat 10 UPT yang tidak memiliki target IKU Pembangunan menuju WBK/WBBM, namun tetap dilaksanakan penilaian sebagai pemeriksaan komitmen UPT dalam melaksanakan Pembangunan Zi menuju WBK/WBBM yang sebelumnya telah dicanangkan, dengan catatan 3 UPT tidak menyampaikan dokumen/lnk;
4. Hasil penilaian Pembangunan Zi Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 sebagai manterlampir dan rincian LKE serta rekomendasi perbaikan yang telah kami sampaikan ke masing-masing Unit Pelaksana Teknis dapat dipergunakan sebagai dasar pemenuhan IKU Pembangunan Zi menuju WBK/WBBM.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, ducapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP  
Pj.Beketaris Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan  
dan Perikanan

Woro Nur Endang Barlati

Tembusan:  
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran I  
 Nomor : B.179/BPPMHKP.1/OT.710/I/2026  
 Tanggal : 15 Januari 2026

Hasil Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM  
 Lingkup BPPMHKP

NO.	UNIT KERJA	TARGET NILAI	PENILAIAN MANDIRI BPPMHKP	KETERANGAN
1.	Stasiun KPM Melaka	72	72,31	Target Tersegal
2.	Stasiun KPM Samarang	72	72,31	Target Tersegal
3.	Stasiun KPM Surabaya I	72	77,72	Target Tersegal
4.	Stasiun KPM Denpasar	72	74,42	Target Tersegal
5.	Stasiun KPM Makassar	72	73,13	Target Tersegal
6.	<b>BALI</b> / <b>BALI KPM JAKARTA I</b>			- Tidak Jadi (CJ) - Tidak Mengirim Link/akumum
7.	<b>BALI</b> / <b>KPM MEDAN</b>	72	72,2	Target Tersegal
8.	<b>BALI</b> / <b>KPM BALI KUPANG</b>	72	22,12	Target Tersegal
9.	<b>BALI</b> / <b>KPM JAYAPURA</b>	72		Tidak Mengirim Link/akumum dan Belum Terisi
10.	<b>BALI</b> / <b>KPM JAKARTA II</b>	72	72,14	Target Tersegal
11.	<b>BALI</b> / <b>KPM SUKABAYA II</b>			- Tidak Jadi (CJ) - Tidak Mengirim Link/akumum
12.	<b>BALI</b> / <b>KPM MATARAM</b>	72	22,82	Target Tersegal
13.	<b>BALI</b> / <b>KPM BANTUL</b>	72	72,04	Target Tersegal
14.	<b>BALI</b> / <b>KPM LAMPUNG</b>	72		Tidak Mengirim Link/akumum dan Belum Terisi
15.	<b>BALI</b> / <b>KPM AMBON</b>	72	22,12	Target Tersegal
16.	<b>BALI</b> / <b>KPM ENTALONG</b>		22,78	Tidak Jadi (CJ)
17.	<b>BALI</b> / <b>KPM TANJUNG PINANG</b>	72	72,00	Target Tersegal
18.	<b>BALI</b> / <b>KPM TARAKAN</b>	72	72,00	Target Tersegal
19.	<b>STASIUN KPM</b> PALEMBANG	72	78,21	Target Tersegal
20.	<b>STASIUN KPM</b> BANDUNG		22,84	Tidak Jadi (CJ)
21.	<b>STASIUN KPM</b> MEDAN	72	72,84	Target Tersegal
22.	<b>STASIUN KPM</b> PONTIANAK	72	72,42	Target Tersegal
23.	<b>STASIUN KPM</b> GENDAR	72	72,82	Target Tersegal
24.	<b>STASIUN KPM</b> BATAM	72	72,17	Target Tersegal
25.	<b>STASIUN KPM</b> PADANG	72	22,33	Target Tersegal
26.	<b>STASIUN KPM</b> JAYA	72	22,03	Target Tersegal
27.	<b>STASIUN KPM</b> PULU	72	72,02	Target Tersegal
28.	<b>STASIUN KPM</b> PULANGKURUYA	72	72,21	Target Tersegal
29.	<b>STASIUN KPM</b> KUPANG	72	72,04	Target Tersegal
30.	<b>STASIUN KPM</b> PANGKUL PINANG	72	22,2	Target Tersegal
31.	<b>STASIUN KPM</b> TERNATE	72	72,32	Target Tersegal
32.	<b>STASIUN KPM</b> YOGYAKARTA	72	22,03	Target Tersegal
33.	<b>STASIUN KPM</b> ACEH	72	22,03	Target Tersegal
34.	<b>STASIUN KPM</b> GORONTALO	72	72,01	Target Tersegal
35.	<b>STASIUN KPM</b> POKOKBUDU	72	72,71	Target Tersegal
36.	<b>STASIUN KPM</b> MEDAN II		22,62	Tidak Jadi (CJ)
37.	<b>STASIUN KPM</b> SERANG	72	72,31	Target Tersegal
38.	<b>STASIUN KPM</b> BENGKULU	72	72,03	Target Tersegal
39.	<b>STASIUN KPM</b> CIREBON	72	22,02	Target Tersegal
40.	<b>STASIUN KPM</b> LUMUR SANGGU		22,22	Tidak Jadi (CJ)
41.	<b>STASIUN KPM</b> TANJUNG BALEU BASHIN		22,07	Tidak Jadi (CJ)
42.	<b>STASIUN KPM</b> BIMA		22,02	Tidak Jadi (CJ)
43.	<b>STASIUN KPM</b> YOGO			- Tidak Jadi (CJ) - Tidak Mengirim Link/akumum
44.	<b>STASIUN KPM</b> BAI-BAU		72,02	Tidak Jadi (CJ)
45.	<b>STASIUN KPM</b> MERAUK	72	77,72	Target Tersegal
46.	<b>STASIUN KPM</b> MANOKWARI	72	73,33	Target Tersegal
47.	<b>BALI</b> / <b>STASIUN KPM</b>	72	72,39	Target Tersegal

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Nama Basaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, ilmiah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
Nama IKU 16		Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Nilai)						
TIR		TAHUN						
		Q1	Q2	8m.I	Q3	Q4	8m.II	Tahunan
Target		3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
Realisasi		91,15	98,94	94,04	93,40	88,16	84,77	-
% Capaian		103,57%	110,15%	108,88	106,13	99,16	120,00	-

Capaian :

- Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
- Bm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
- Bm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
- Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

**Ieu Utama dan Implikasi**

Peningkatan penilaian kinerja pelayanan kepuasan masyarakat (BKM) dengan melalui responden survey hasil validasi Balai KIPM Jakarta II pada triwulan IV realisasi dengan nilai 96,15 kategori (A) sangat baik. Dengan jumlah responden 61.

Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{8} = 0,1111$$

Untuk memperoleh nilai BKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai perscpel per unsur} \times \text{Nilai penimbang Total unsur yang terdapat}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

Untuk memudahkan Interpretasi terhadap penilaian BKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut dilanjut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan  $\times 25$

<b>Akar Masalah</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mohon dapat ditingkatkan kualitas/kemudahan akses sistem layanan.</li> <li>- Menyederhanakan prosedur layanan sertifikasi.</li> </ul>
<b>Tindakan yang telah dilaksanakan</b>

Rekomendasi/rancangan aksi	Penanggung Jawab	Periode
	Pusat Manajemen Mutu	Tw.4 Tahun 2025

Data Dukung SKM Tipe A

